BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini peneliti memberikan hasil yang telah ditemukan dan memberikan analisis terhadap hal-hal yang telah ditemukan pada bab sebelumnya. Selain itu peneliti melakukan pembahas dengan menghubungkan hasil pada wawancara dan observasi yang dilakukan kepada informan.

Data yang diperoleh tersebut dikumpulkan, disusun, kemudian dianalisis, serta metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus. Studi kasus adalah uraian dan penjelasan komprehensif mengenai berbagai aspek seorang individu, suatu kelompok, suatu organisasi (komunitas), suatu program, atau suatu situasi sosial. (Mulyana, 2008:201)

Pada analisis ini telah dilakukan wawancara dan observasi kepada para informan, yaitu Bagian Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat dan wartawan. Hal-hal yang ditanyakan pada wawancara berkaitan dengan data informan dan pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian. Adapun data informan Bagian Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat dan wartawan meliputi nama, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, jabatan, serta lamanya bekerja.

Bab ini merupakan hasil penelitian mengenai Penggunaan *Website* Dewan Peerwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat http://dprd.jabarprov.go.id Dalam Penyampaian Informasi Di Kalangan Wartawan yang merupakan kegiatan *Public Relations On The Net* pada Bagian Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat. Hasil penelitian ini akan dibahas pada sub-sub bab, yaitu :

1. Deskripsi identitas informan.
    - Identitas Bagian Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat.
    - Identitas Wartawan.
2. Deskripsi hasil penelitian.
3. Pembahasan.

4.1 Deskripsi Identitas Informan

Deskripsi identitas informan merupakan penggambaran dari data mengenai identitas informan dalam penelitian. Tidak semua informan dalam penelitian ini ingin disebutkan namanya, karena berkaitan dengan hubungan profesi mereka. Berkaitan dengan hal tersebut, peneliti menggunakan inisial untuk menyamarkan nama informan tersebut. Adapun informan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Dra. Siti Nina N (Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat)

Gambar 4.1
Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat
DPRD Provinsi Jawa Barat



Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2011

Informan yang mengawali karir sebagai guru di salah satu Sekolah Menengah Atas Swasta Kota Bandung ini, memberikan kesan tersendiri selama penelitian berlangsung. Ketika peneliti melakukan proses pencarian data, informan ini begitu memperhatikan peneliti dan selalu menanyakan bagaimana kelengkapan data yang diperlukan dalam penelitian ini. Pegawai Negeri Sipil yang bekerja sudah 21 tahun memiliki pendidikan terakhir sarjana di bidang akuntansi, kini menjabat sebagai Kepala Bagian Humas dan Protokol di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat, selalu bersedia untuk melakukan wawancara dengan peneliti. Sebagai seorang wanita, Bu Nina sapaan akrabnya sangatlah menjungjung tinggi makna emansipasi wanita, tak heran ibu yang memiliki empat orang putra giat bekerja dan dapat memimpin Bagian Humas dan Protokol, walaupun beliau masih terbilang baru di Bagian Humas dan Protokol, akan tetapi beliau cukup memahami dan mengetahui bidang kehumasan dan berbagai program Sekretariat DPRD Prov. Jawa Barat. Pada saat proses wawancara

informan cukup terbuka dalam memberikan berbagai jawaban, sehingga membantu dalam penelitian ini. Pribadi yang ramah dan santai pun selalu terlihat disetiap informan menjawab pertanyaan yang peneliti utarakan. Dengan keterbukaan dan sifat keibuannya, informan disela-sela wawancara selalu menceritakan pengalaman kerjanya serta memberikan nasihat-nasihat untuk peneliti pada saat memasuki dunia kerja.

2. Nanang Syaefudin, S.Sos., M. Si. (Kepala Sub Bagian Publikasi Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat)

Gambar 4.2
Kepala Sub Bagian Publikasi



Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2011

Sosok humoris, ramah, dan bersahabat ini membuat informan begitu mudah ditemui untuk proses wawancara. Informan yang mengawali karir sebagai wartawan media cetak ini telah banyak memiliki pengalaman serta pengetahuan dalam menulis berita, me*lobby* seseorang, dan mengetahui begitu banyak hal. Selain wartawan, informan juga aktif mengajar di salah satu Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi dan sudah 22 tahun bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil hingga saat ini. Kini, informan yang menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Publikasi di

Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat bersedia memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti. Pada saat wawancara, informan begitu santai dan panjang lebar menjawab berbagai pertanyaan dari peneliti. Namun, terkadang ada beberapa pertanyaan yang terkesan dijawab dengan cukup hati-hati. Tak lupa disela-sela wawancara informan selalu memberikan humor untuk menghangatkan suasana. Informan pun selalu memberikan nasihat dan mengingatkan peneliti untuk segera menyelesaikan penelitian ini.

3. Utti Kaniawati, S.Sos. (Staf Pelaksana Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat)

Gambar 4.3

Staf Pelaksana Humas dan Protokol



Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2011

Informan ini awalnya terlihat begitu pendiam dan sedikit kaku, akan tetapi setelah peneliti mengutarakan maksud peneliti, informan pun bersedia dengan ramah untuk membantu peneliti. Informan yang sudah 11 tahun menjadi Pegawai Negeri Sipil ini dipercaya oleh Bagian Humas dan Protokol sebagai pembuat berita dalam *website* DPRD. Pada saat proses wawancara, informan ini terlihat sekali menjawab pertanyaan peneliti

dengan penuh hati-hati, mungkin informan masih dapat dikatakan junior pada Bagian Humas dan Protokol. Namun, informan cukup terbuka ketika peneliti melakukan diskusi biasa disela-sela waktu istirahat kerjanya.

4. NR (Wartawan Media *Online*)

Informan yang tidak ingin disebutkan namanya ini, memiliki hobby menulis sejak lama, maka tak heran beliau menjadi wartawan yang aktif dan gesit dalam mencari berita. Informan yang aktif dan produktif ini, lebih sering mengisi waktunya untuk menulis berita pada media *online* di *website* instansi pemerintahan. Pada saat peneliti bertemu untuk wawancara, peneliti tidak dapat berlama-lama mewawancarai beliau, karena kesibukannya dalam melakukan pencarian berita. Wanita yang telah 9 tahun berkecimpung di dunia jurnalistik ini, dalam menjawab pertanyaan peneliti begitu terbuka, lugas, dan tidak bertele-tele.

5. HR (Wartawan Media Cetak)

Sosok ramah dan kebapaan ini memang membuat nyaman peneliti untuk berdiskusi. Informan yang telah 10 tahun terjun di dunia jurnalis ini, pribadi merupakan pribadi yang menganggap hidup itu mudah dan jangan dibuat sulit. Pada saat peneliti bertemu pertama kali dengan informan, peneliti harus menunggu informan hingga beberapa jam. Memang beliau tidak mau meluangkan waktu pada saat jam kerja. Meskipun, mudah untuk melakukan wawancara, tetapi jawaban yang dilontarkannya tidak terlalu terbuka. Informan menjawab dengan hati-

hati, sesekali iya memberikan tanggapan tentang bagaimana Lembaga DPRD itu dan bagaimana pelayanan yang diberikan Humas.

6. ES (Wartawan Media Cetak)

Informan yang bisa dibilang baru memasuki dunia jurnalistik ini, merupakan sosok yang terbuka dan ramah. Informan yang baru dua tahun menjadi jurnalis ini, begitu lugas dalam menjawab pertanyaan peneliti. Tak hanya itu, beliau pun mengkritisi bagaimana Lembaga DPRD dan mengkritisi pelayanan yang diberikan Humas. Wajar saja karena semangat jiwa muda membuatnya selalu menginginkan adanya keterbukaan pada Lembaga legislasi ini.

4.2 Deskripsi Hasil Penelitian

Penggunaan *website* instansi memang diperlukan sebagai jendela informasi bagi siapa saja yang membutuhkan. Adanya tuntutan era globalisasi dan kemajuan teknologi mengharuskan berbagai pihak dapat menyesuaikan diri dengan keadaan tersebut. Praktik penyampaian informasi atau sosialisasi dengan menggunakan *website* sudah menjadi suatu keharusan pada lembaga legislasi yang merupakan wakil rakyat. Dengan sistem *E-Government* yang melatarbelakangi praktik *Public Relations On The Net* pada Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat merupakan fasilitator dewan. Penggunaan *website* DPRD Jawa Barat harus dapat menjangkau berbagai kalangan, mulai dari masyarakat biasa, OPD (Organisasi Perangkat Daerah), bisnis, dan media. Adanya *website* DPRD Jawa Barat merupakan suatu sarana penyampaian pesan yang cepat dan lebih tepat sasaran serta sebagai saluran aspirasi secara *online*. Selain itu,

website DPRD Jawa Barat dapat menggantikan media konvesional (*press release* dan papan pengumuman) di kalangan wartawan untuk dapat membantu dalam pencarian berita seputar dewan.

3.2.1 Manfaat penggunaan *website* DPRD Jawa Barat http://dprd.jabarprov.go.id dalam penyampaian informasi di kalangan wartawan

Berdasarkan hasil wawancara secara mendalam dengan informan dan melakukan observasi langsung, hasil yang ditemukan dari manfaat *website* DPRD Jawa Barat http://dprd.jabarprov.go.id pada bagi Bagian Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Jawa Barat dalam penyampaian informasi di kalangan wartawan, yakni dimanfaatkan untuk memberikan informasi menyeluruh mengenai apa saja kegiatan resmi yang dikerjakan dewan selama ini secara langsung dan cepat. Manfaat *website* DPRD Jawa Barat http://dprd.jabarprov.go.id dari informasi yang disampaikan dapat dijadikan data pendukung dalam menunjang pencarian berita bagi kalangan wartawan. Beberapa menu yang sering dimanfaatkan oleh kalangan wartawan maupun Bagian Humas dan Protokol, diantaranya: Agenda Dewan, berita, dan Raperda maupun Perda. Menu-menu tersebut dimanfaatkan wartawan sebagai data pendukung untuk membuat suatu isu yang dijadikan bahan pemberitaan di medianya. Bagi Bagian Humas dan Protokol sendiri, menu tersebut dimanfaatkan sebagai penyampaian informasi dan sosialisasi tentang kegiatan resmi dewan. Menu Agenda Dewan merupakan salah satu menu *website* yang menerangkan jadwal kegiatan resmi dewan. Pada menu ini terdapat hari, tanggal, bulan, tahun dan waktu pelaksanaan kegiatan resmi dewan.

Penjelasan agenda kegiatan dewan dapat digambarkan seperti pada gambar 4.4 di bawah ini,

Gambar 4.4

Agenda Dewan



Sumber : http://dprd.jabarprov.go.id, 2011

Selanjutnya *pressrelease* yang telah dijadikan beerita matang dalam *website* DPRD Jawa Barat dapat diakses dengan menu berita yang dimanfaatkan oleh Bagian Humas untuk sosialisasi penyampaian informasi seputar hasil dari kegiatan resmi yang dilakukan dewan. Menu berita dapat digambarkan seperti gambar 4.5 di bawah ini,

Gambar 4.5

Berita pada Portal Publik



Sumber : http://dprd.jabarprov.go.id, 2011

Dengan membagi dua portal dalam *website* DPRD JABAR http://dprd.jabarprov.go.id, yakni portal publik yang dapat diakses oleh siapa saja, dan portal internal yang hanya diakses oleh pihak dalam Bagian Humas dan Protokol serta Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat, memberikan kemudahan dan keleluasaan dalam melakukan pembuatan atau *upload* data jadwal, berita, produk dewan (perda atau raperda) agar mudah di*publish*.

Seperti hasil wawancara dengan Siti Nina, Kepala Bagian Humas dan Protokol yang memberikan informasi kepada peneliti. Proses wawancara

dilakukan di ruang Bagian Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat,

> "Banyak manfaatnya ya, cepat memberikan informasi dan apapun masalah dari luar kita langsung mengetahui berapa banyak yang masuk mengenai dewan, kemudian kegiatan dewan tuh apa, masyarakat bisa tahu dari kegiatan dewan bisa digambarkan di situ (*website*). Selain itu, *website* bisa menyampaikan informasi untuk masyarakat baik dari jauh atau dari dekat, dewan sendiri bisa memberikan informasi yang benar-benar sesuai dengan kegiatannya baik kegiatan perkomisi atau lainnya, seperti sidang paripurna atau rapat badan kelengkapan DPRD yang difasilitasi oleh Humas dan Protokol. Semua itu dikumpulkan informasinya di *website*. Informasi itu disampaikan oleh Bagian Humas dan Protokol yang mengikuti kegiatan itu, kemudian dia akan mengambil apa saja hasil dari kegiatan itu. Untuk wartawan sendiri ada juga manfaat itu, jadi dia dapat membuka setiap hari apa saja hasil dari kegiatan itu. Sebetulnya wartawan dengan masyarakat sama, cuma wartawan sesuai bidangnya lebih cepat membuka, sedangkan masyarakat cuma iseng-iseng saja membukanya untuk mengetahui betul *nggak* kegiatan dewan *teh*, kalau wartawan setiap hari dia akan membuka kemana saja kegiatan dewan dia akan melihat judul, seperti melakukan kunjungan kemana, menerima aspirasi dari siapa. Justru *website* membantu wartawan, dia tidak usah datang jauh-jauh dan kita juga mengirim melalui *email*."[1]

Untuk menu dalam *website* DPRD Jawa Barat yang sering digunakan oleh Bagian Humas dan Protokol, Siti Nina mengatakan bahwa,"Kalau menu sih banyak seperti yang ada di *website*, yang digunakan biasanya itu yang kegiatan dewan aja sebenarnya sih, agenda-agenda kegiatan dewan sama berita aja, seperti berita kegiatan kunjungan saja sementara itu."[2] *Website* DPRD Jawa Barat http://dprd.jabarprov.go.id selain bermanfaat, juga memiliki fungsi dalam penyampaian informasi, seperti yang dikatakan Sit Nina bahwa,

[1] Wawancara pada 6 Juni 2011

[2] Ibid

> "Banyak fungsinya yaitu untuk menyampaikan informasi banyak macam-macam informasinya untuk masyarakat, menyampaikan apa yang dikerjakan dan hasil kegiatan resmi dewan untuk wartawan maupun pihak lain yang membutuhkan, dan juga berguna bagi Sekretariat DPRD untuk lebih cepat dalam penyampaian dan perolehan informasi, jadi kalau ada apa-apa kita bisa cepat tahu."[3]

Selanjutnya wawancara dilanjutkan dengan informan Nanang Syaefudin, sebagai Kepala Sub Bag Publikasi mengenai fungsi dari *website* DPRD Jawa Barat http://dprd.jabarprov.go.id, informan menjelaskan,

> "Supaya masyarakat memahami, bahwa di DPRD itu dewan melakukan sesuatu untuk kepentingan masyarakat banyak. Fungsi *website* untuk wartawan itu, untuk memberikan informasi kepada wartawan, karena mereka harus tahu jadwal dewan, kemudian tahu apa yang sudah dikerjakan dewan termasuk pimpinan ya kalau dewan, kemudian tentang kegiatan sekretariat yang berkaitan dengan fasilitasi."[4]

Peneliti melanjutkan pertanyaan lainnya pada informan penelitian, "lalu apa yang dirasakan dari dirasakan dari penggunaan *website* DPRD JABAR http://dprd.jabarprov.go.id Pak?". Informan penelitian kemudian menjawab,

> "Lebih detail dalam penyampaian informasi, karena kita kelola sendiri jadi gimana kita. Ya yang namanya media konvensional seperti media cetak ya itu *teh* dibatasi, jadi kita dibatasi oleh kepentingan bisnis mereka. Kita tidak bisa seenaknya, misalkan nih kita mau nulis A sampai Z nanti penuh *dong* koran, sementara mereka punya kepentingan lain sesuai misi mereka, kan kalau di media cetak *mah* sejengkal pun harus jadi uang, makanya masuknya ke industri informasi."[5]

Sependapat dengan yang diutarakan kedua informan sebelumnya, Utti Kaniawati selaku Staf Pelaksana Bagian Humas dan Protokol menyatakan, "…Manfaat *website* sendiri sebagai sarana sosialisasi kegiatan DPRD, kalau

---

[3] Wawancara pada 6 Juni 2011

[4] Wawancara pada 30 Mei 2011

[5] Ibid

untuk wartawan sendiri ya sebagai data pendukung mereka dalam membuat berita dewan atau DPRD."[6] Mengenai fungsi *website* DPRD Jawa Barat informan Utti Kaniawati mengatakan, "Fungsinya sih sebagai sarana sosialisasi kegiatan DPRD, kan selama ini masyarakat tidak banyak tahu tentang kegiatan DPRD. Selain itu, pengganti *release* buat wartawan yang biasanya harus di*print* dan *fotocopy."* [7]

Berkaitan dengan hal tersebut peneliti melanjutkan pertanyaan,"Kalau begitu Bu, sering *nggak* berita yang Ibu buat dimuat di surat kabar?". Informan menjawab, "Ya *nggak* terlalu sering tapi suka ada, kalau wartawan biasanya mengakses *website* untuk data pendukung, jadi *nggak* men*caplok* langsung, tapi kalau wartawan yang ada kerjasama biasanya langsung meng*copy-paste*, seperti koran lokal Radar Bandung dan koran daerah."[8]

Informan lain yang memberikan informasi yaitu, NR wartawan media *online* mengungkapkan bahwa *website* DPRD Jawa Barat http://dprd.jabarprov.go.id memiliki fungsi yang bermanfaat bagi penunjang pencarian isu. Seperti pada hasil wawancara berikut,

> "*Website* DPRD menunjang, itu kan tuntutan era globalisasi sudah berkembang. Berbicara produk media massa, sekarang semua media masa ada *website*nya. Mungkin kalau saya analisa kedepan, semakin banyak berita *online*, mungkin cetak semakin berkurang. Apalagi kita ditunjang dengan HP (*Handphone*) yang perangkat seperti itu…kan kalau dengan koran saya harus mencari dulu, kalau ini kan langsung di*klik* di HP. Jadi, fungsinya lebih mudah dan efektif."[9]

[6] Wawancara pada 30 Mei 2011

[7] Ibid

[8] Ibid

[9] Wawancara pada 25 Mei 2011

Saat ditanya mengenai menu apa saja dalam *website* DPRD yang sering diakses dan memberikan manfaat adalah,

> "Biasanya sih jadwal kalau saya, kalau berita saya bikin sendiri. Kalau kita kan hanya sebatas jadwal nanti dari jadwal ketemu isu, misalkan Bapak Ketua atau Komisi lagi acara apa, nantikan ketemu isu. Saya nggak pernah ngambil berita. Maaf saja, bukannya itu artinya lebih bagus saya, tapi kan artinya media saya dituntut untuk mengembangkan isi sendiri, berdasarkan tuntutan perusahaan. Jadi, saya hanya sebatas jadwal saja."[10]

Informan HR salah satu wartawan surat kabar di Bandung mengungkapkan manfaat *website* DPRD Jawa Barat dengan singkat, "Paling tidak sedikit membantu dari pemberitaan dan dari agenda dewan juga bisa, sedikit jika ada yang perlu."[11]

Ditanya mengenai menu apa saja dalam *website* DPRD yang sering diakses dan memberikan manfaat menurut informan adalah, "Berita, karena kita kan perlu *updating* berita dari DPRD."[12]

Berbeda pendapat ketika peneliti melakukan wawancara dengan informan ES wartawan surat kabar ternama, ia mengungkapkan bahwa,

> "*Website* DPRD sebenarnya kurang menunjang, karena disitu hanya ada agenda yang waktu kegiatannya hanya dicantumkan untuk hari ini atau kemarin, sedangkan untuk besok *nggak* ada. Jadi *updating*nya kurang, tapi untuk informasi raperda atau perda *updating*nya sering."[13]

---

[10] Ibid

[11] Wawancara pada 26 Mei 2011

[12] Ibid

[13] Wawancara pada 31 Mei 2011

Peneliti pun menanyakan kembali, “Kalau kurang menunjang terus Aa pernah mengakses menu apa untuk bahan berita Aa tentang DPRD?”, Informan menjawab,

> “Biasanya saya melihat agenda kegiatan dewan atau komisi. Terkadang juga melihat menu raperda dan perda, mana saja perda atau raperda yang diajukan dan sudah disahkan. Untuk menu berita sendiri saya tidak sering mengakses, karena biasanya saya hanya melihat kegiatan dewan atau melihat raperda dan perda yang telah disahkan kemudian saya langsung menghubungi instansi yang bersangkutan dengan raperda yang tersebut untuk dibuat jadi berita. Jadi hanya agenda dan raperda saja sebagai acuan saya membuat berita atau isu, tidak memanfaatkan berita yang ada pada *website*.”[14]

Informan ini menyayangkan adanya *website* tidak dirasa dapat memberikan informasi transparan mengenai DPRD Jawa Barat sesuai yang diinginkan masyarakat. Selain itu, informan sebelumnya dari kalangan wartawan memanfaatkan *website* DPRD hanya sebagai acuan mengetahui kegiatan resmi dewan dan untuk pemberitaannya mereka membuat sendiri isu yang sesuai dengan misi serta kepentingan media meraka.

4.2.2 Efisiensi penggunaan *website* DPRD Jawa Barat http://dprd.jabarprov.go.id dalam penyampaian informasi di kalangan wartawan

Adanya penggunaan *website* DPRD Jawa Barat http://dprd.jabarprov.go.id dapat mengefisiensi segala kegiatan penyampaian informasi Bagian Humas dan Protokol secara menyeluruh. Tak hanya dirasakan Bagian Humas dan Protokol saja, tetapi dengan fasilitas *website* DPRD Jawa Barat yang mudah diakses semua kalangan dengan *one stop*

[14] Ibid

shop dapat mengefisiensi kerja wartawan dalam pencarian bahan berita. Tanpa harus mendatangi Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat, para wartawan dapat melihat agenda kegiatan resmi dewan, berita apa saja kegiatan resmi yang dilakukan dewan, hingga produk Perda maupun Raperda dengan mengakses *website* DPRD Jawa Barat http://dprd.jabarprov.go.id dimana saja dan kapan saja, karena dapat diakses selama 24 jam. Efisiensi yang terlihat meliputi kualitas sarana *website*, proses penyampaiannya, ketersediaan menu yang selalu berjalan baik ketika dibutuhkan, waktu yang dipergunakan, serta biaya yang digunakan.

Adapun hasil wawancara mendalam dengan Siti Nina Kepala Bagian Humas dan Protokol, mengenai efisiensi *website* DPRD dibandingkan dengan media konvesional dalam penyampaian informasi,

> "Sebenarnya kalau dengan kualitas media biasa itu kan perlu waktu ya, kalau dengan *website* itu cepat kita kan langsung masuk langsung cepat diterima oleh yang bersangkutan oleh wartawan. Lebih efektif dan efisien, kalau itu kan (media biasa) harus nunggu satu hari, kalau dari *website* kan langsung, apalagi sekarang sudah mempunyai *email* tersendiri jadi lebih mudah, kalau dewan tidak punya *email* kan susah, mau ngasih ke siapa ini, *press release*nya disimpan saja disini kan *nggak* efektif."[15]

Sedangkan dalam proses penyampaian informasi pada *website* DPRD, informan menyatakan,

> "Sebenarnya kalau langkah-langkahnya, kita berawal dari kunjungan anggota dewan yang bersangkutan itu kan diikuti oleh orang Humas, kemudian hasil dari kepulangan dari kegiatan atau kunjungan itu kan nanti disusun dibikin *press release*nya itu. Setiap kegiatan mana pun setiap hari lah kegiatan dewan itu semua ditampung di Humas, karena ada orang Humas sudah diposisikan di sana sudah terjadwal. Jadi setiap

[15] Wawancara pada 6 Juni 2011

> hari harus ada inputnya ke dalam dan dibuat melalui *website* untuk disosialisasikan dan langsung diterima masyarakat dan wartawan." [16]

Peneliti melanjutkan pertanyaan, "Bu, kalau begitu portal internal yang dipergunakan untuk membuat berita atau informasi selalu berjalan baik jika dibutuhkan? dan lama tidak waktu yang digunakan?", informan menjawab dengan singkat, "Iya dalam keadaan baik. Untuk waktu tidak butuh waktu yang lama, sebenarnya kalau data sudah diterima harus langsung dibuat dan di*publish*, tapi kalau datanya tidak ada ya kita menunggu orang yang datang dari kunjungan."[17]

Terkait dengan biaya pemakaian informan ini menanggapi bahwa tidak ada perbedaan biaya yang mencolok, seperti yang dikatakannya,

> "*Nggak* ada perbedaan biaya untuk menyampaikan informasi, hanya barang kali *website* ini kan punya kegiatan misalnya adanya kerjasama dengan pihak jaringan, jadi kita tetap membayar internetnya. Berkaitan dengan murah atau tidaknya sebenarnya tergantung, kalau kita ingin cepat maju dengan era globalisasi masa kita mau seperti yang dulu pakai *press release,* sebenarnya itu tidak efisien itu akan menjadi basi beritanya, tapi kita ingin berita yang cepat diterima oleh masyarakat yaitu diperlukan satelit untuk internet dan itu memerlukan biaya."[18]

Informan Nanang Syaefudin sebagai Kepala Sub Bagian Publikasi mengatakan bahwa kualitas *website* DPRD dibandingkan media konvensional, seperti,

> "Ini kan sesuai dengan perkembangan jaman artinya kan teknologi kita semakin maju, DPRD sebagai lembaga legislatif yang memang harus mengikuti perkembangan zaman ya kita manfaatkan…tetapi dengan *website* kita ingin menjangkau yang lebih jauh, dapat dibaca oleh pihak internasional. Ya artinya bukan saja untuk Jawa Barat, Indonesia, tetapi

[16] Ibid

[17] Ibid

[18] Ibid

> mungkin saja dibaca oleh Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri. Untuk wartawan sendiri, kita memberikan kemudahan yang lebih efisien dengan mengakses informasi dewan secara menyeluruh juga detail dari *website.*"[19]

Dilihat segi pembiayaannya informan ini berpendapat, "Ada, dengan adanya program *website* pembiayaan bertambah, karena kita masih dipertahankan juga media konvesional. Namun, biayanya lebih hemat ini (*website*) sebetulnya tetapi ada hal-hal lain yang tidak dapat digantikan."[20] Untuk waktu yang diperlukan informan mengatakan, "Tidak lama, kita langsung menyampaikan informasi, karena kita memiliki datanya mereka. Jadi ada yang disampaikan langsung ke *email* medianya atau ke individunya (wartawannya)."[21]

Sama dengan pendapat sebelumnya, informan Utti Kaniawati sebagai Staf Pelaksana Bagian Humas dan Protokol mengungkapkan,"Kalau dulu kan wartawannya kita kasih *release* lewat *faximail* atau *fotocopy* ditaruh di meja, nah kalau sekarang mereka tinggal membuka *website*nya tinggal meng*klik* saja. Jadi sekarang lebih mudah."[22]

Mengenai proses penyampaian informasi di *website* DPRD pun sama seperti tanggapan informan sebelumnya, Informan ini menanggapi, "Ya tahapannya kan dibikin dahulu, data yang kita bikin berasal dari hasil

[19] Wawancara pada 30 Mei 2011

[20] Ibid

[21] Ibid

[22] Ibid

peliputan Humas dan Protokol yang mengikuti kegiatan dewan, kalau sudah bisa di*publish* ya langsung saja diakses."[23]

Berkaitan dengan lama waktu dan biaya informan memberikan pendapat sebagai berikut,

> "Tidak lama kan dari *website* bisa langsung diakses…Pasti ada sih, dibandingkan dengan *pressrelease* biasa lebih hemat *website*, kan wartawan kalau sekarang tinggal meng*klik* saja. Namun, sebenarnya hemat itu relatif tergantung pemakaiannya. Dari *website* juga bisa lebih banyak biayanya, seperti biaya listrik dan internet, tetapi dari internet memberikan jangkauan yang luas siapa saja bisa mengakses dan informasinya banyak."[24]

Informan lain yang merasakan efisiensi dari *website* DPRD Jawa Barat yaitu, NR wartawan media *online* berpendapat bahwa,

> "Iya dari jadwal saya kira. Saya tinggal nyari isu, narasumber yang berkompeten ada dimana ketemu kan dari jadwal ditentukan, ini komisi *anu* berangkat ke *anu* tinggal telepon deh, ini sedang dalam rangka apa tinggal telepon. Iya langsung menghubungi narasumber, tidak melalui Humas, saya asal hapal jadwal, oh ini ke sini. Palingan minta nomor telepon saja jika tidak punya."[25]

Peneliti melanjutkan kembali pertanyaan, "Kemudian, bagaimana kualitas layanan yang diberikan bagian humas dan protokol Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat melalui *website* dibandingkan dengan media konvensional?", informan menjawab dengan lugas, "Ya kalau saya mempergunakan jalur itu ya berarti sudah bagus. Iya praktis itu (*website*),

---

[23] Ibid

[24] Ibid

[25] Wawancara pada 25 Mei 2011

kalau dengan papan pengumuman kan ada kalanya telat, kalau tanya langsung kan ada kalanya mungkin gitu (sulit), jadi lewat *website* saja."[26]

Wawancara diteruskan dengan informan HR wartawan surat kabar menyatakan *website* memberikan kemudahan baginya, "Ya ada, kita disediakan *website* dapat memudahkan dari waktu."[27] Selanjutnya mengenai kualitas layanannya informan berpendapat, "Sebenarnya melalui website kualitasnya memberikan kemudahan, *cuma updating*nya itu masih telat."[28]

Sependapat dengan informan sebelumnya, informan ES wartawan surat kabar pada saat menunggu Sidang Paripurna usai, mengenai kualitas layanan *website* DPRD ini berpendapat,

> "Kalau secara formal maupun informal itu baik-baik juga, hanya bukan pelayanan biasa buat kita, tapi lebih ke transparansi karena kita memang membutuhkan transparansi. Misalkan kalau kita ingin menemui ketua dewan atau apa itu kan harus ada birokrasi, nah tanpa menutup mata dan tanpa menutup telinga itu kan reformasi birokrasi itu masih belum berjalan optimal." [29]

Namun, saat peneliti menanyakan, "Terus Aa merasakan ada kemudahan *nggak* dari *website* DPRD Jawa Barat dalam pencarian bahan berita?", informan pun menjawab dengan singkat bahwa, "Kemudahannya hanya dapat menunjang dalam segi agenda kegiatan dewan saja, karena dari agenda dewan itu kita membuat isu sendiri untuk pemberitaan."[30]

---

[26] Ibid

[27] Wawancara pada 26 Mei 2011

[28] Ibid

[29] Wawancara pada 31 Mei 2011

[30] Ibid

Bukan saja kemudahan dan kecepatan penyampaian serta pengaksesan informasi melalui *website* DPRD Jawa Barat http://dprd.jabarprov.go.id, tetapi perlunya kualitas layanan yang selalu termonitoring untuk memberikan informasi terbaru sangat diperlukan dalam mendukung efisiensi penggunaan *website* DPRD Jawa Barat http://dprd.jabarprov.go.id dalam penyampaian informasi di kalangan wartawan.

4.2.3 Partisipasi pada penggunaan *website* DPRD Jawa Barat http://dprd.jabarprov.go.id dalam penyampaian informasi di kalangan wartawan.

Hasil wawancara mendalam dan observasi yang dilakukan peneliti mengenai partisipasi kalangan wartawan, diilustrasikan seperti pada wawancara dengan informan Siti Nina Kepala Bagian Humas dan Protokol yang mengatakan,

> "Untuk partisipasi atau tanggapan biasanya itu dari masyarakat, itupun melalui SMS. Kalau dari wartawannya sendiri belum ada yang memberikan tanggapan, terlebih tanggapan negatif masih aman dan barangkali masih normal-normal saja. Kecuali, mereka memberi tanggapan secara kritisi melalui tulisan mereka di media mereka."[31]

Hal serupa dikatakan oleh informan lainnya yaitu, Utti Kaniawati Staf Pelaksana Bagian Humas dan Protokol,

> "Sebenarnya ada menu untuk memberikan sarana atau tanggapan, tetapi fungsinya penyampaian aspirasi ke DPRD dan sepertinya belum berjalan maksimal. Biasanya aspirasi ditujukan ke dewan itu dari masyarakat, kalau wartawan biasanya langsung memberi tanggapan ke kita, itu berkaitan dengan hal teknis…"[32]

[31] Wawancara pada 6 Juni 2011

[32] Wawancara pada 30 Mei 2011

Peneliti kemudian menanyakan pertanyaan lain, “Terus Bu, ada ga bentuk partisipasi lain, seperti mereka mengisi atau memberi referensi berita pada *website* DPRD?”, informan menjawab dengan sedikit mengingat, “selama ini tidak ya, karena berita di *web* kan kita yang buat. Jadi kita sudah punya tim sendiri untuk pembuatan berita yang tentunya seputar kegiatan dewan”.[33]

Informan lain Nanang Syaefudin Kepala Sub Bagian Publikasi mempertegas tentang partisipasi pada *website* DPRD Jawa Barat http://dprd.jabarprov.go.id, “Ada untuk masyarakat namanya aspirasi (Kirim Aspirasi), kalau untuk wartawannya tidak ada, justru mereka yang membutuhkan kita, apa yang ada di media itu media kita kemudian di*caplok* untuk dijadikan berita.”[34]

Selanjutnya peneliti bertanya kembali, “Bagaimana bentuk partisipasinya Pak?”, informan pun menjawab dengan jelas,

> “Ada yang memberi saran atau keluhan. Ada dua jenis bentuk di kolom aspirasi, ada yang membutuhkan jawaban dari dewan maka bersifat politis dalam bentuk kebijakan, kalau ke sekretariat artinya teknis. Selama ini yang menjadi permasalahan adalah menjawab pertanyaan dari masyarakat, apakah melalui *e-mail* atau surat biasa kita kirimkan kembali.” [35]

Pertanyaan dilanjutkan peneliti dengan menanyakan, “Kalau begitu, ada ga bentuk partisipasi lain, seperti mereka mengisi atau memberi referensi

[33] Ibid

[34] Ibid

[35] Ibid

berita pada *website* DPRD?", informan penelitian menjawab dengan tegas bahwa, "Tidak ada wartawan yang mengisi berita di *web*, kan kita Bagian Humas sudah membuat tim tersendiri untuk melakukan peliputan setiap kegiatan dewan. Jadi kita menempatkan tim tersebut sebagai wartawan sendiri."[36]

Berkaitan dengan partisipasi dijelaskan pula oleh informan penelitian NR sebagai wartawan media *online*, beliau mengaku bahwa,

> "Oh nggak, belum pernah menyampaikan pendapat lewat *web*, hanya itu saja (jadwal) saya memanfaatkannya...belum pernah memberikan tanggapan, karena selama ini cukup kan, saya biasanya mengomentari kalau ada yang kurang, kalau dirasa cukup *ngapain* gitu."[37]

Lalu peneliti menanyakan kembali, "Terus Bu, tanggapan yang bagaimana jika ada yang kurang?", informan menjawab dengan singkat, "Ya saya sih cuma mengingatkan saja langsung pada Humas biasanya, seperti jadwal yang belum *terupdate* untuk hari ini."[38] Mengenai tanggapan tentang aplikasi "Kirim Aspirasi", informan NR mengatakan, "Saya belum pernah ya memakai menu itu, ya kan tujuan saya sebatas melihat jadwal, jadi untuk aspirasi tidak terlalu mengetahui."[39] Lanjut peneliti menanyakan mengenai partisipasi dalam bentuk lain, seperti pengisian berita pada *website* DPRD Jawa Barat, informan menyatakan bahwa, "Tidak, saya tidak pernah mengisi berita pada *website* DPRD ya, karena itu bukan bagian saya, kan itu sudah

[36] Ibid

[37] Wawancara pada 25 Mei 2011

[38] Ibid

[39] Ibid

tugas Humas yang mengisi berita di *web* dan saya sebatas melihat saja untuk kepentingan bahan berita saya."[40]

Hal senada diungkapkan HR wartawan surat kabar mengenai partisipasi beliau mengatakan, "Tidak pernah. Mungkin hanya orang-orang tertentu saja, seperti staf dan belum pernah memanfaatkan aplikasi "Kirim Aspirasi", karena memang untuk orang-orang tertentu yang punya kepentingan."[41] Kemudian peneliti menanyakan kembali, "Adakah tanggapan atau saran yang Bapak berikan melalui *website*?", informan menjawab, "Kalau melalui *website* tidak pernah tetapi secara langsung pernah, ya kalau *website*nya *nggak update* kita memberi tahu langsung ke Humasnya."[42] Peneliti melanjutkan pertanyaan mengenai tanggapan tentang aplikasi "Kirim Aspirasi", informan mengatakan bahwa,

> "Menurut saya, ya menu itu hanya digunakan orang-orang tertentu ya untuk menyampaikan kepentingannya, karena saya belum melihat dan mencoba jadi saya kurang tahu tentang itu, yang jelas bagi saya menu itu bukan kepentingan saya."[43]

Serupa dengan sebelumnya, informan ES pun mengatakan, "Belum pernah *ngasih* tanggapan atau pendapat, apalagi berita belum pernah mengisi pada *website* kita kan beda media."[44]

---

[40] Ibid

[41] Wawancara pada 26 Mei 2011

[42] Ibid

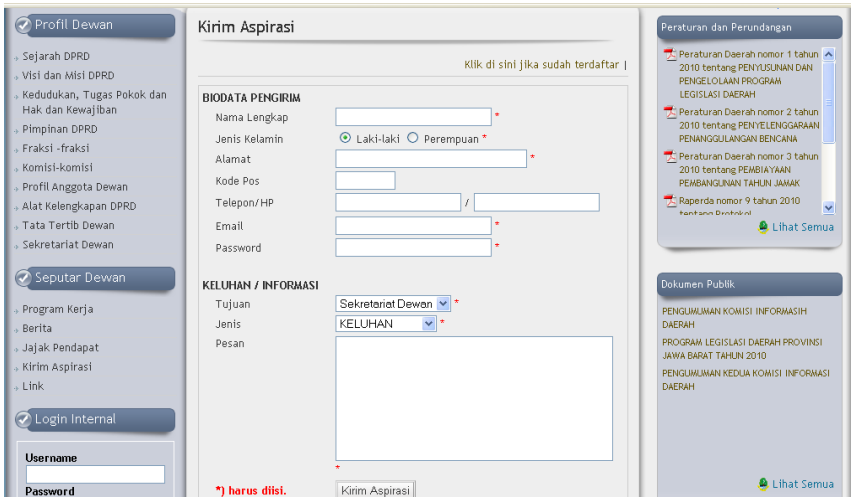
[43] Ibid

[44] Wawancara pada 31 Mei 2011

Melihat hal tersebut, partisipasi dalam *website* DPRD Jawa Barat http://dprd.jabarprov.go.id memang jelas lebih diperuntukan bagi masyarakat. Dimana partisipasi tersebut merupakan aspirasi masyarakat bagi pendukung kinerja dewan serta pertimbangan dalam pengambilan keputusan suatu kebijakan. Saat melakukan observasi pada *website* DPRD, portal publik menyediakan menu Kirim Aspirasi yang diperuntukan sebagai saluran aspirasi secara *online*. Adapun menu partisipasi yang dijelaskan pada gambar 4.6 di bawah ini,

Gambar 4.6

Menu Kirim Aspirasi



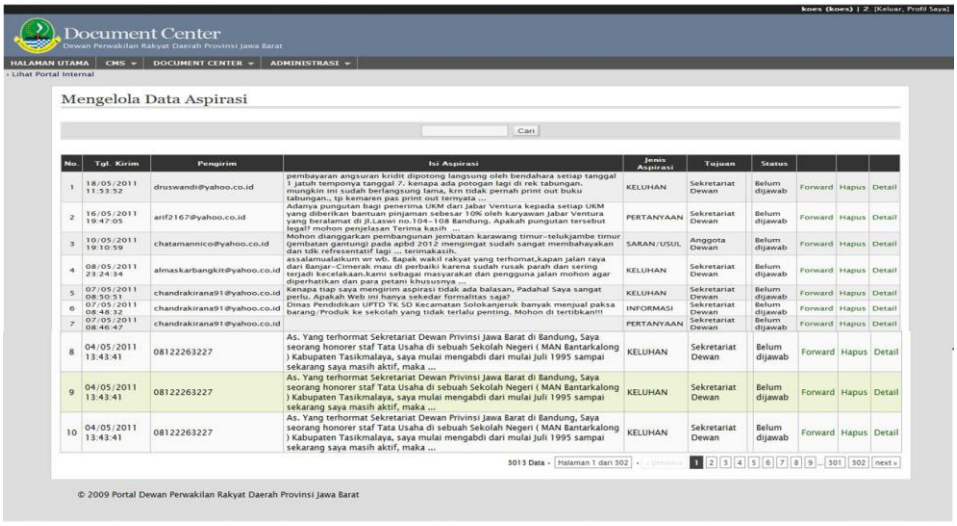
Sumber : http://dprd.jabarprov.go.id,2011

Namun, peneliti mengamati portal internal dari aspirasi masyarakat yang masuk, tidak secara langsung ditanggapi dengan balasan dari pihak Humas. Hanya saja, aspirasi yang masuk dibuatkan suatu bentuk laporan dan selanjutnya diberikan kepada dewan untuk ditindak lanjuti. Hal tersebut memerlukan birokrasi dan waktu yang panjang untuk menanggapi suatu partisipasi dalam bentuk aspirasi, baik saran, keluhan, hingga pertanyaan.

Adapun tampilan pengelolaan aspirasi pada portal internal yang dijelaskan pada gambar 4.7 di bawah ini,

Gambar 4.7

Pengelolaan Aspirasi Pada Portal Internal



Sumber : http://dprd.jabarprov.go.id,2011

4.2.4 Transparansi informasi pada penggunaan *website* DPRD Jawa Barat http://dprd.jabarprov.go.id dalam penyampaian informasi di kalangan wartawan

Berdasarkan wawancara mendalam dan dialog dalam penelitian ini, dapat mengungkapkan transparansi informasi yang terdapat pada *website* DPRD Jawa Barat http://dprd.jabarprov.go.id, nampak jelas bahwa transparansi informasi yang diberikan Bagian Humas dan Protokol berbeda dengan transparasi informasi yang diinginkan kalangan wartawan. Pada dasarnya transparansi menurut semua informan penelitian mengartikan sebagai keterbukaan, informasi yang disampaikan sesuai dengan fakta dan apa adanya. Namun, arti keterbukaan yang sesungguhnya tidak dapat

dirasakan oleh sebagian kalangan, terutama kalangan wartawan. Peneliti melihat kalangan wartawan merasa transparansi informasi yang diberikan belum dapat dikatakan terbuka, meskipun dengan adanya *website* DPRD Jawa Barat mendorong keterbukaan informasi pada lembaga legislatif itu. Wartawan menganggap keterbukaan informasi tidak hanya memberikan informasi seputar kegiatan yang dilakukan dewan saja, tetapi lebih ke hal bagaimana dewan menindaklanjuti atau menyelesaikan suatu *political issue* serta permasalahan sosial yang berada di masyarakat sesuai dengan pelaksanaan perda yang telah disahkan.

Hasil wawancara mendalam dan dialog yang dilakukan peneliti dengan informan Siti Nina, Kepala Bagian Humas dan Protokol, yang menjelaskan bahwa,

> "Sudah mendorong keterbukaan informasi dengan kita memunculkan berita, itu berarti kita sudah membuka keluar bahwa kegiatan dewan tuh ini, dengan adanya *website* justru kita sudah melakukan keterbukaan publik dengan masyarakat, bahwa kegiatan dewan tuh apa saja jangan dianggap dewan "tidur". Berkaitan dengan transparansi, artinya keterbukaan itu *teh*, jadi begini ya kita dengan masyarakat dan dengan dewannya sendiri terbuka setiap masalah, tapi tidak semuanya dibuka, hanya permasalahan kegiatan dewan ya silahkan dibuka. Sebenarnya kita sudah terbuka karena sifat lembaga kita yang dengan adanya Undang-Undang Keterbukaan Publiknya semuanya harus terbuka dari kegiatan dewan, hingga aspirasi kita terima dengan baik."[45]

Dari pernyataan tersebut peneliti mencoba mengkonfimasi tanggapan wartawan dengan menanyakan, "Tapi Bu, berkaitan dengan anggapan sebagian wartawan yang melihat berita di *website* tuh hanya seputar kegiatan saja, tidak memunculkan berita tentang suatu isu di masyarakat yang di

[45] Wawancara pada 6 Juni 2011

klarifikasi atau tanggapan tentang keluhan masyarakat, itu bagaimana?", informan menjawab dengan tegas,

> "Sebenarnya, kalau di *website* kita kan hanya memberikan berita kita tentang kegiatan anggota dewan, tidak mungkin kita membuat berita yang diluar itu, karena *website* dewan memberikan informasi seputar dewan jangan memberikan informasi isu-isu diluar itu, kalau mereka (wartawan) sih silahkan *mangga*, jika ada isu yang di koran ya mereka klarifikasi ke sini, karena kita berbeda kepentingan kita kan lembaga jadi kepentingannya memberikan informasi menyangkut kegiatan dewan, kalau diluar dari itu kan bukan kewenangan kita."[46]

Selanjutnya wawancara dilanjutkan dengan informan Nanang Syaefudin, Kepala Sub bagian Publikasi yang mengatakan bahwa,

> "Kita dituntut keterbukaan informasi sesuai Undang-Undang dalam Komisi Informasi Publik. Kita dipaksa amanat Undang-Undang ya kita harus laksanakan. Berkaitan dengan transparansi itu salah satu amanat Undang-Undang yang sudah diberikan oleh pemerintah yang implementasinya keluarnya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Transparansi berita itu diatur Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan kita diatur lagi dengan Undang-Undang tentang Kerahasian Negara, jadi ada beberapa informasi yang kita lindungi juga tidak harus semuanya dibuka."[47]

Peneliti melanjutkan pertanyaan untuk mengkonfirmasi anggapan wartawan, "Lalu Pak, ada selingan atau anggapan sebagian wartawan yang melihat berita di *website* tuh hanya seputar kegiatan saja, tidak memunculkan berita tentang suatu isu di masyarakat atau tanggapan tentang keluhan masyarakat, menurut Bapak bagaimana?", informan menjelaskan jawabannya sebagai berikut,

> "Sudah mengarah ke situ, kita kan memposisikannya sebagai wartawan sebetulnya Humas itu dengan media *online*nya, dan kemudian menanggapi isu di masyrakat kita tidak bisa menanggapi secara langsung ya. Kita bisa

[46] Ibid

[47] Wawancara pada 30 Mei 2011

> menggunakan media orang lain yang terkait dengan kerjasama, seperti Radio RRI. Radio RRI kerjasama dengan kita, kita meminta RRI untuk mewawancarai masyarakat kemudian mewawancarai komisi terkait yang ada di sini dan kita mem*publish* juga di *website* kegiatan itu."[48]

Disela-sela wawancara peneliti melontarkan pertanyaan, "Kalau begitu apa yang dimaksud dengan "berita resmi" ?", informan memberikan penjelasannya,

> "Di sini tidak ada "berita resmi", begini dewan itu menganut *collective collegee ai*, jadi di Humas fungsinya hanya sebagai fasilitator bagi kepentingan dewan. Misalnya, dewan ingin ngomongin ini kita hanya memfasilitasi wartawan untuk mendengar apa yang ingin disampaikan oleh dewan. Jadi di situ (apa yang disampaikan dewan) semua resmi, kita tidak pernah membuat *press release* yang dikeluarkan (pernyataan) Humas sendiri itu tidak bisa, karena kita harus menyampaikan informasi kepada masyarakat yang difasilitasi oleh media (wartawan), hanya kita ada dibagian itu, sekarang kita ikut mem*publish* lewat *website*."[49]

Peneliti melanjutkan wawancara dengan Utti Kaniawati selaku Staf Pelaksanan Bagian Humas dan Protokol yang biasa membuat berita dalam *website,*berkaitan dengan keterbukaan informasi dalam *website* DPRD Jawa Barat http://dprd.jabarprov.go.id beliau mengatakan,

> "Mungkin salah satunya memang ke arah sana ya adanya *website* itu. Kalau keterbukaan informasi tergantung atasan, kalau kita sih hanya menulis berita yang memutuskan bagaimana terbuka atau tidaknya ya atasan, karena kan kita menulis sesuai dengan data yang diperoleh, kemudian diperiksa sama atasan dan atasan minta konfirmasi ke dewannya apakah layak atau tidak beritanya untuk di*pulish*. Jadi informasi yang lebih sering di*publish* tentang kegiatan dewan, kalau diluar itu seperti isu politik tidak, kecuali ketua dewan mengeluarkan pernyataan itu pernah kita dibuatkan beritanya." [50]

Mengenai arti transparansi sendiri Utti Kaniawati mengatakan bahwa,

---

[48] Ibid

[49] Ibid

[50] Wawancara pada 30 Mei 2011

> "Tranparansi yaitu keterbukaan, akan tetapi kita Bagian Humas tidak dapat membuat berita yang sifatnya mengkritisi atau mengangkat isu politik, karena bukan kewenangan kita, kan sebenernya kita Humas tuh cuma membuat berita tentang kegiatan dewan, kalau diluar itu kita tidak boleh, apalagi kita (Bagian Humas dan Protokol) membuat pernyataan sendiri di berita *website* ya jelas itu dilarang. lembaga DPRD juga biasanya tidak dapat secara langsung mengkritisi seseorang/gubernur, maka dari itu terkadang wartawan dan masyarakat hanya menilai kalau DPRD kerjanya jalan-jalan saja."[51]

Selanjutnya peneliti menanyakan mengenai wartawan yang menganggap pemberitaan *website* DPRD Jawa Barat hanya seputar kegiatan dewan tidak memunculkan berita mengenai suatu isu tertentu di masyarakat untuk diklarifikasi, informan mengatakan bahwa,

> "Ya memang tugas kita hanya membuat berita seputat kegitan dewan, kalau diluar itu, misalkan kita membuat berita dari pernyataan Bagian Humas ya itu tidak diperbolehkan. Sebenarnya kita hanya punya kewenangan untuk membuat dan mem*publish* berita kegiatan dan untuk konfirmasi isu di masyarakat pernah sih tetapi tidak sering sih tergantung kalau ada yang harus ditanggapi dewan ya ditanggapi, kemudian kita buat beritanya."[52]

Peneliti kembali menanyakan mengenai berita negatitf yang ada di media dan bagaimana tindakan Humas, informan pun menjelaskan bahwa, "Kalau berita negatif ada, tapi biasanya humas langsung melakukan fasilitasi jumpa pers untuk mengklarifikasi berita tersebut dan yang melakukan klarifikasi biasanya Ketua."[53]

Wawancara pun dilakukan dengan informan NR wartawan media *online* yang mengatakan berita transparan adalah,

---

[51] Ibid

[52] Wawancara pada 30 Mei 2011

[53] Ibid

> "Mengungkapkan fakta yang ada, fakta temuan ya terutama kalau dewan itu yang paling penting. Bisa juga mengungkap aturan main, kan harus ada, apa itu dikatakan menyimpang, aturan main mana yang dipakai kan harus ada. Kayak contoh kasus kejadian SUS Gedebage, dewan kan berani mengungkap bagaimana tiang pancangnya belum selesai. Teruskan dulu ada transparansi yang sangat menonjol, ketika ada peninjauan SUS Gedebage itu terungkap dengan adanya jumlah dana sekian dengan target sekian tapi kenyataannya bertolak belakang. Jadi didalam *website* berita pun tidak ada ditutup-tutupi."[54]

Informan NR sebenarnya menginginkan bentuk transparansi terutama pada pemberitaan pada *website*, ia mengatakan,

> "Ya memang berita di *website* lebih mengekspose kegiatan dewan yang sesuai di lapangan, tapi sebaiknya jangan terbatas di kegiatan saja, lebih ditekankan lagi berita seputar dewan yang menanggapi kritisi masyarakat, seperti acara forum dialog di beberapa radio. Disana kita bisa tahu gimana tanggapan langsung dewan dari keluhan atau kritikan masyarakat, dan kegiatan itu pun seharusnya dijadikan pemberitaan pada *website*, jadi bentuk pemberitaannya seperti kolom artikel."[55]

Berbeda pendapat dengan informan HR yang mengatakan, "Transparan relatif ya. Transparan berartikan banyaknya hal yang harus terbuka, tembus pandang dan bisa dilihat dari luar.", peneliti melanjutkan pertanyaan, "Terus Pak, apakah berita di *website* DPRD Jawa Barat dapat dikatakan transparan?", informan menjawab dengan sedikit hati-hati, "Sebenarnya belum transparan, karena berita yang ditampilkan hanya "berita resmi" atau "berita gunting pita."[56]

Selanjutnya peneliti menanyakan lebih lanjut tentang "berita resmi", peneliti mendengar dari seorang wartawan lain pada saat wawancara dengan informan HR berbiccara, " "berita resmi" atau "berita gunting pita" itu berita

[54] Wawancara pada 25 Mei 2011

[55] Ibid

[56] Wawancara pada 26 Mei 2011

yang *nyenengin* dewan saja, *muji-muji* dewan *nggak* ada manfaatnya, buang-buang anggaran saja!", pernyataan seorang wartawan lain. Informan HR pun menganggukan pernyataan tersebut. Peneliti langsung menanyakan maksud tersebut pada informan HR, "oh gitu ya Pak?, terus *muji-muji* dewan maksudnya apa Pak?", informan menjawab, "Iya sebenarnya beritanya tuh berita yang bagus-bagus terus tentang dewan, berita kegiatan terus jadi tidak ada nilai beritanya bagi kami (wartawan).", lanjut peneliti, "Nilai beritanya itu harus yang bagaimana?", informan kembali menjawab, "Ya yang jelas ada hal menarik dalam berita itu, baik *hot issue* atau penyelesaian permasalahan di masyarakat."[57]

Sependapat dengan informan ES wartawan surat kabar yang di wawancarai saat acara Sidang Paripurna, mengatakan bahwa,

> "Kalau masalah itu ya, masalah transparan atau nggaknya itu bukan subjektif tapi objektifitas yang diperlukan. Berkaitan dengan berita yang ada di *website* menurut saya ya kurang transparan *sih*, kan kebanyakan tentang kegiatan dewan saja, sebenarnya bukan itu saja *sih* yang di*pengenin* masyarakat."[58]

Peneliti mencoba menanyakan kembali, "Terus Aa kalau begitu berita di *website* DPRD Jawa Barat yang transparan tuh seperti apa?", informan menjawab dengan santai, "Ya sesuai dengan yang d*ipengenin* masyarakat, dewan bisa merespon dan menindaklanjuti persoalan yang ada di masyarakat sekarang ini."[59]

---

[57] Ibid

[58] Wawancara pada 31 Mei 2011

[59] Ibid

4.2.5 Manejemen perubahan penggunaan *website* DPRD Jawa Barat http://dprd.jabarprov.go.id dalam penyampaian informasi di kalangan wartawan

Banyak hal dalam manajemen perubahan ini, dimulai dari pentingnya perencanaan dan pengembangan ke depan. Selama peneliti melakukan observasi dan wawancara mendalam, pada dasarnya *website* DPRD Jawa Barat merupakan suatu perencanaan dewan yang menginginkan informasi mengenai dewan langsung sampai kepada masyarakat. Pada pengembangannya *website* DPRD Jawa Barat dikelola oleh pihak luar yang mengerti bidang teknologi internet atau IT *(Information Tecnology)* untuk *maintanence* dari *software* dan jaringan, serta pihak dalam yang memiliki kewenangan untuk menggunakan *website* DPRD Jawa Barat, yakni Bagian Humas dan Protokol yang dalam hal ini hanya sebagai *user* dari aplikasi yang ada. Praktik *Public Relations on the net* yang menggunakan sistem *E-Government* diperlukan adanya monitoring dan kontrol yang ketat. Proses *updating* informasi sangat dibutuhkan dan tentunya keterlibatan seluruh staf Humas yang menjadi faktor utama dari pengelolaan *update* informasi. *Updating* inilah yang selalu menjadi keluhan di kalangan wartawan.

Hasil wawancara mendalam dan dialog yang dilakukan peneliti dengan informan Siti Nina sebagai Kepala Bagian Humas dan Protokol mengatakan,

> "Orang sini juga, hanya barangkali ada kerjasama dengan pihak ketiga dalam hal jaringan. Jadi ada pengontrolan dalam seminggu 2 sampai 3 kali. Kalau untuk Bagian Humas sendiri Sub Publikasi yang punya wewenang untuk itu (*website* DPRD)."[60]

[60] Wawancara 6 Juni 2011

Peneliti kembali menanyakan tentang tugas dari Sub Publikasi terkait dengan *website* DPRD Jawa Barat, informan mengatakan, "Menghimpun data-data dari dewan kegiatannya, nanti masuk ke Sub Bag Publikasi nanti diolah mana saja yang perlu atau tidak untuk di*publish*."[61] Untuk kebijakan dari pelaksanaan tersebut informan hanya mengungkapkan,

> "Ya sebenarnya hanya kebijakan mem*publish* berita kegiatan saja. Berkaitan dengan kriteria berita itu ada tergantung berita apa dulu, misalkan berita kegiatan Pimpinan Dewan, harus ada kegiatannya, fotonya dilapangan dan harus memenuhi 5W+1H semua ter*cover*. Sebenarnya kalau beritanya terlalu ini ya kita pikirkan lah, tetapi kalau positif ya tidak apa-apa. Namun, kalau berita itu sedikit hangat ya kita minta pendapat dari pimpinan, karena semua berita tidak bisa langsung ditampilkan harus dipulas dahulu jadi ada proses penyaringan biar enak kitanya."[62]

Berkaitan dengan *update* berita yang menjadi keluhan dari wartawan peneliti mencoba menanyakan pada saat wawancara, "Bu sebenarnya, seberapa sering pengelola melakukan pengontrolan dan *update* berita dalam *website* DPRD Jawa Barat http://dprd.jabarprov.go.id?", informan menjawab dengan terbuka,

> "Sebetulnya itu setiap hari kita kontrol, waktu-waktunya tergantung waktu dari masing-masing kitanya. Berkaitan dengan kurang ter*update* itu kembali lagi kalau beritanya jarang, terus kunjungannya banyak begitu pulang beritanya basi, seharusnya hari ini ternyata besok baru *dipublish*, memang itu ada saja terjadi, karena kunjungan biasanya malam hari baru selesai dan berita itu tidak langsung bisa dibuat hari itu juga, ya keterbatasan orang Humas yang tidak semua mampu menggunakan laptop, belum lagi jika adanya gangguan signal."[63]

[61] Ibid

[62] Ibid

[63] Ibid

Informan lainnya Nanang Syaefudin sebagai Kepala Sub Bagian Publikasi mengatakan hal yang sama dengan informan Siti Nina, yakni, "Ada operator yang mengelola secara *software* dan teknis, tapi yang mempunyai hak *publish* saya, karena dalam TUPOKSInya ada di saya (Publikasi)."[64] Selaku Kepala Sub Publikasi, beliau menjelaskan tugas dari penggunaan *website* DPRD Jawa Barat, "Ya mengelola *website* dalam meng*upload*, karena kita Humas yang bertanggungjawab dan hanya Humas yang bisa meng*upload* informasi itu."[65] Sedangkan untuk kebijakan dalam *website* informan mengatakan bahwa,

> "Yang pasti kita tidak ke kebijakan ya, kita hanya ke teknis. Misalnya ketika ada anggota ingin menyampaikan sesuatu, kita mencatat kemudian mempublikasikan. Di situ mungkin sesuai TUPOKSI saya, saya harus memilah, bisa saja anggota dewan menyerang siapa ya kita tidak bisa mem*publish* itu. Jadi hanya informasi kegiatan atau informasi yang disampaikan dewan. Jadi sifatnya tidak negatif, dan untuk isu politik kita tidak tajam membahas hanya mencatat apa yang disampaikan dewan."[66]

Pertanyaan yang sama peneliti lontarkan kepada informan penelitian, "seberapa sering pengelola melakukan pengontrolan dan *update* berita dalam *website* DPRD Jawa Barat http://dprd.jabarprov.go.id?, karena banyak wartawan yang mengeluh tentang berita yang itu-itu saja?", informan menjawab dengan singkat tanpa ada penjelasan lebih lanjut yakni, "Sering, setiap hari, waktunya pasti siang atau sore hari dan sekarang *mah update* terus."[67]

---

[64] Wawancara pada 30 Mei 2011

[65] Ibid

[66] Ibid

[67] Ibid

Peneliti melanjutkan wawancara dengan informan Utti Kaniawati sebagai Staf Pelaksana Humas dan Protokol mengatakan, "Bagian Humas dan Protokol, pada Sub Bagian Publikasi yang mengelola *website* DPRD." Berkaitan dengan *updating* informasi atau berita informan mengatakan,

> "Tergantung kalau saya mengikuti kegiatan berarti saya harus meng*update* berita. Jadi sekarang gini sebenarnya bukan saya saja yang mengikuti kegiatan, tetapi mereka juga yang mengikuti kegiatan harus meliput dan membuat berita, karena kebetulan hanya beberapa orang yang bisa ya saya bantuin. Jadi sebenarnya *update* berita tergantung dari kegiatan dewan kalau *nggak* ada ya beritanya *nggak* di*update*. Sama juga dengan agenda dewan."[68]

Selanjutnya peneliti menanyakan kepada informan lainnya NR sebagai wartawan media *online* mengenai pengelolaan *website* DPRD Jawa Barat yang dilakukan bagian Humas, informan mengungkapkan bahwa, "Pengelolaannya sudah baik dapat menunjang dari pembaruan jadwal. Jika terdapat kendala teknis suka saya kasih tahu langsung, misalkan tanggal sekian belum ada yang untuk kegiatan."[69], berkaitan dengan *updating*, informan menanggapi,

> "Kalau saya lihat sekarang ada kemajuan, kalau ada kegiatan dewan, misalkan tiga hari kedepan paling tidak sudah ada pada hari ini. Namun, ada kalanya harus diingatkan kembali secara langsung, kenapa kegiatan hari ini belum ada." [70]

Peneliti mencoba menanyakan kepada informan NR mengenai penanganan masalah teknis Bagian Humas dan Protokol pada *website* DPRD Jawa Barat, informan mengaku, "Ada penangan langsung, tapi biasanya dari

[68] Ibid

[69] Wawancara pada 25 Mei 2011

[70] Ibid

pihak luar juga yang nanganin itu, karena kan mungkin di Bagian Humas masih kurang orang yang tahu nangani *website*."[71]

Perbedaan pendapat pun terjadi pada informan HR sebagai wartawan surat kabar yang menjabat sebagai staf redaksi, Beliau masih merasa kurang baiknya pengelolaan dari *website*, mengatakan bahwa,

> "Sedikit ini ya lebih banyak telatnya, *updating* kayak kegiatan harian tidak terlalu ini (*update*) sekian hari baru muncul. Jadi, tidak saat dia (bagian Humas) sedang ada di lokasi langsung *update* beritanya kan tidak, tapi baru besoknya baru ada. Jadi tidak terlalu menunjang kegiatan saya, saya inisiatif saja sendiri mencari dari media lain."[72]

Informan HR juga menjelaskan tentang monitoring pembaharuan informansi yang dilakukan Bagian Humas dan Protokol pada *website*, "Masih kurang, ya lihat saja informasinya baik berita atau agenda masih itu-itu aja. Apalagi kalau berita suka lama *update*nya jadi beritanya sudah *nggak* baru, karena telat *publish*nya itu."[73] Untuk penanganan masalah teknis pada pengaksesan *website* DPRD Jawa Barat informan mengatakan bahwa,

> "Humas biasanya ada *outsourching* (orang luar) untuk penanganan masalah teknis, jika tidak bisa diakses karena masalah teknis dari *website*nya, biasanya saya suka langsung bilang ke Humas dan orang dari luar dipanggil langsung untuk menangani portal publik yang bermasalah."[74]

Sependapat dengan informan HR, informan lain ES sebagai wartawan surat kabar merasakan hal yang sama, seperti yang diungkapkannya, "Ya kembali tadi kalau misalkan dari segi agendanya *update* ya baik tapi kalau

---

[71] Ibid

[72] Wawancara pada 26 Mei 2011

[73] Ibid

[74] Ibid

agenda itu-itu aja kan bisa lah tarik kesimpulan sendiri.", ditanya mengenai monitoring yang dilakukan Humas informan menjawab hal yang sama, "Ya kalau itu tergantung humas saya *nggak* terlalu mementingkan itu, ya gini aja pada intinya kalau dari segi monitoring *updating*nya yang baik berarti pelayanannya *oke."*[75] Lanjut peneliti menanyakan, "Lalu yang Aa rasakan dari pengelolaan yang sekarang dilakukan Humas bagaimana?", informan ES menjawab, "Ya untuk sekarang sih *update* agendanya untuk dua hari ke depan ada, tapi biasanya setelah itu suka telat masih itu-itu aja agendanya."[76] Kemudian mengenai penanganan masalah teknis oleh Bagian Humas dan Protokol informan ES mengatakan, "Ya selama ini saya mengakses di kantor jadi untuk sementara saya merasa masih dalam keadaan baik jika mengakes *website* DPRD ini. Kalau untuk penanganan jika ada masalah teknis, ya Humas pasti langsung ditangani."[77]

Sangat penting manejemen perubahan konten dalam *website* yang dilakukan Bagian Humas dan Protokol untuk selalu meng*update* pemberitaan atau jadwal kegiatan secara cepat dan berkala. Keterlibatan seluruh staf Humas dan Protokol sudah saatnya dituntut untuk memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memadai di bidang IT dan pengolahan berita, jadwal, serta aplikasi lainnya dalam *website* DPRD Jawa Barat http://dprd.jabarprov.go.id,

[75] Wawancara pada 31 Mei 2011

[76] Ibid

[77] Ibid

karena mereka merupakan *user* yang tentunya harus dapat mengelola media tersebut.

4.2.6 Penggunaan *website* DPRD Jawa Barat http://dprd.jabarprov.go.id dalam penyampaian informasi di kalangan wartawan

Pengggunaan *website* DPRD Jawa Barat http://dprd.jabarprov.go.id merupakan suatu kegiatan Humas yang baru dalam menyampaikan informasi melalui internet secara *online*. Penggunaan *website* DPRD Jawa Barat memang ditujukan kepada masyarakat luas, termasuk kalangan wartawan. Adanya penggunaan *website* DPRD Jawa Barat http://dprd.jabarprov.go.id untuk kalangan wartawan dapat mengganti media konvensional, seperti papan pengumuman maupun lembaran *press release* yang dinilai kurang efektif dan efisien. Hadirnya *website* DPRD Jawa Barat menjadi alasan tersendiri bagi Bagian Humas dan Protokol, seiring dengan kemajuan teknologi yang tentunya harus diikuti, agar tidak ada anggapan ketinggalan zaman bagi instansi yang memfasilitasi kepentingan lembaga legislatif ini. Hal tersebut memang mendapatkan respon yang lumayan positif bagi sebagaian kalangan wartawan, karena dengan adanya *website* mereka sedikit terbantu mengenai informasi dewan tanpa harus menunggu kiriman *press release* atau datang dan bertanya pada Bagian Humas dan Protokol. Namun, tak lantas penggunaan tersebut tidak terhindar dari hambatan-hambatan. Ada beberapa hambatan yang tentunya menjadi salah satu penilaian negatif kalangan wartawan dari hadirnya *website* DPRD Jawa Barat.

Seperti hasil wawancara mendalam dan observasi yang dilakukan peneliti, informan penelitian Siti Nina Kepala Bagian Humas dan Protokol mengatakan awal hadirnya *website* DPRD Jawa Barat,

> "Sebenarnya pembentukan *website* itu prinsipnya kita ingin masyarakat mengetahui keberadaan DPRD, dari kegiatannya, dan fasilitasnya. Selain itu, tuntutan jaman sesuai dengan keberadaan dewan dan *website* juga yang membutuhkan itu dari keinginan dewan, supaya informasi dapat diterima oleh masyarakat tentunya membutuhkan suatu alat, maka BURT membuat rekomendasinya untuk *website* ini."[78]

Penggunaan *website* DPRD Jawa Barat http://dprd.jabarprov.go.id di kalangan wartawan pun tidak terlepas dari berbagai alasan, seperti yang dikatakan informan Siti Nina,

> "Ya jelas karena kita Bagian Humas sebagai hubungan masyarakat jadi sudah menjadi TUPOKSInya untuk memberikan informasi seputar dewan, kalau untuk wartawan kan dengan adanya *website* mereka mudah mengakses sendiri informasi dewan, tanpa harus kita mem*photocopy press release* atau jadwal. Ya kalau ada wartawannya, kalau tidak kan bisa jadi basi beritanya dan buang-buang uang untuk *photocopy*. Tapi biasanya kita juga selain lewat *website*, kita langsung menyampaikan melalui *email* ke lembaga medianya, jadi tidak ke individunya, paling juga wartawan dari luar agar lebih efisien disediakan *website* itu jadi bisa dilihat dimana saja.[79]

Dari penggunaan *website* DPRD Jawa Barat http://dprd.jabarprov.go.id pun diakui informan Siti Nina ada hambatan yang menjadi kendala bagi Bagian Humas, dimana masih sulitnya staf Bagian Humas dan Protokol yang dapat menguasai perangkat IT serta pembuatan press release secara *online*, seperti pada hasil wawancara berikut ini,

> "Kurang Sumber Daya Manusianya, Sumber Daya Manusia itu memang diperlukan karena orang Humas yang mempunyai pengetahuan IT itu

[78] Wawancara 6 Juni 2011

[79] Ibid

> hanya sebagian, dan untuk tim operator sendiri belum ada masih terbatasnya Sumber Daya Manusia yang ada. Kalau teknis ya kadang-kadang suka ada tapi karena kita ada kerjasama dengan pihak luar maka pengontrolan sering dilakukan."[80]

Disela-sela wawancara peneliti menanyakan tentang ada cara untuk mengatasi keterbatasan Sumber Daya Manusia, informan pun menjawab dengan terbuka bahwa,

> "Sebenarnya kita juga ingin mencari orang yang memiliki jurusan di bidang itu, tapi kalau diluar Pegawai Negeri Sipil kan tidak boleh. Jadi kita selama ini diusahakan untuk dicukup-cukupi, dan sebenarnya ada pelatihan atau bimbingan teknis untuk itu, tapi orang-orang di sini cukup sulit untuk diikutsertakan, karena mereka merasa bukan bagian dari bidang itu (pengelolaan *website*) itu juga yang jadi hambatan."[81]

Informan penelitian lainnya Nanang Syaefudin Kepala Sub Bagian Publikasi, sedikit berbeda pendapat beliau mengatakan awal pembentukan *website* DPRD Jawa Barat bahwa, "*Website* awal mula dibentuk pada tahun 2009 berdasarkan Keputusan Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Barat. Pembentukan ini karena adanya tuntutan kemajuan teknologi dan kebutuhan bagi sarana publikasi Humas.", peneliti pun melanjutkan pertanyaan mengenai alasan penggunaan *website* di kalangan wartawan, informan kembali menjawab,

> "Adanya tuntutan, karena sesuai dengan kemajuan teknologi jadi melalui kehadiran ini kita dipermudah dalamn menggunakan teknologi canggih untuk mengisi atau menyebarluaskan informasi apa yang dikerjakan dewan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya kepada wartawan yang mencari berita dari kita, kemudian pula didukung dengan adanya payung hukum PEMENDAGRI tahun 2011 tentang Tugas-Tugas Kehumasan."[82]

---

[80] Ibid

[81] Ibid

[82] Wawancara pada 30 Mei 2011

Mengenai hambatan yang dihadapi dalam penggunaan *website* DPRD Jawa Barat Nanang Syaefudin sependapat dengan yang diungkapkan informan Siti Nina bahwa, "Dari Sumber Daya Manusia, karena ini pekerjaan spesifik Sumber Daya Manusianya kurang agak lemah jadi perlu peningkatan lebih memperdayakan pekerja yang sesuai dan mampu dalam bidang itu, karena tidak semua pegawai bisa menggunakan itu."[83]

Selanjutnya peneliti mewawancari kepada informan lainnya, Utti Kaniawati Staf Pelaksana Bagian Humas dan Protokol yang memang menjadi staf yang diandalakan dalam penggunaan *website* DPRD Jawa Barat http://dprd.jabarprov.go.id mengatakan alasan menggunakan *website*, "Ya sebagai sarana sosialisasi kegiatan dewan saja sih."[84], lanjut peneliti, "Terus kalau untuk kalangan wartawan sendiri dalam penyampaian informasi ada alasannya mengapa menggunakan *website*?", informan mengatakan, "Ya itu, kita bisa langsung mem*publish pressrelease* dalam bentuk berita pada *website*, jadi *nggak* harus di*photocopy* dan disimpan di sini. Jadi lebih mudah dan cepat untuk informasinya buat wartawan."[85] Peneliti melanjutkan pertanyaan, "Bagaimana hambatannya Bu?", informan menjawab dengan terbuka bahwa,

> "Ya itu keterbatasan Sumber Daya Manusia dalam pembuatan berita, kalau teknis kita tidak ada hambatan itu *mah* ada pihak lain, karena kita *mah user* saja. Biasanya kendala yang dihadapi itu kalau kita kunjungan

[83] Ibid

[84] Wawancara 30 Mei 2011

[85] Ibid

> keluar, beritanya tidak bisa langsung di*publish* karena kita tidak dibekali perangkat laptop atau yang lainnya. Jadi kita tidak bisa membuat berita yang langsung di*publish* hari itu juga, karena perlu proses *editing* dan kurangnya waktu untuk membuat kegiatan, untuk membuat berita jika banyak kegiatan."[86]

Peneliti melanjutkan wawancara dengan informan lain yang berasal dari kalangan wartawan berkenaan dengan penggunaan *website* DPRD Jawa Barat http://dprd.jabarprov.go.id, informan NR wartawan media *online* mengatakan,

> "Ya menurut saya *website* DPRD dapat mengekspose kegiatan apa yang sudah dibuat oleh dewan dan yang kedepan itu harusnya seperti itu. Ya artinya harus melihat apa sih kerja dewan dari fungsi *bugeting*, *controlling*, dan legislasi. Jadi ketiga fungsi itu harus terungkap, dan itu ada semua seperti program legislasi daerah ada pada menu-menu *websitenya*. Tapi yang jelas masukan dari saya, ekspose yang sudah dikegiatan tuh jangan terbatas dikegiatan, misalkan ada isu yang menonjol itu dibuka dan format beritanya seperti didialog beberapa radio. Adakan dewan mempunyai kegiatan seperti itu, dialog di RRI dan masyarakat bisa terbuka mengkritisi pemerintah dan dewan, misalkan menanggapi ketenagakerjaan. Harus bisa dikupas isu-isu seperti itu." [87]

Dari sisi perbedaan penggunaan *website* DPRD dengan media konvensional sebelumnya NR menyatakan,

> "Sarana saja yang berbeda, itu kan perangkat teknologi ya itu saja. Saya tidak pernah melihat ke yang jauh-jauh cuma itu kan bisa praktis di HP *klik* apa situs *anu* (*website* DPRD Jawa Barat) kan bisa langsung keluar, kalau tradisional kan harus nyari, minimal dari sini harus kemana dulu, misalkan ke Bagian Humas."[88]

Informan NR juga mengaku saat peneliti mengajukan pertanyaan, "Adakah tujuan anda yang terpenuhi dari penggunaan *website*?", informan

[86] Ibid

[87] Wawancara pada 25 Mei 2011

[88] Ibid

menjawab, “Ada yang itu tadi, hanya terbatas dari pemanfaatan jadwal untuk memperoleh informasi kegiatan dewan dalam pencarian berita.”[89]

Kemudian informan HR wartawan yang menjabat sebagai staf redaksi surat kabar ini menyatakan pendapatnya bahwa, “Bagus ya, berarti ada sarana yang mempersingkat jadi kita tidak perlu bertanya, jika kita diluar kota kita bisa langsung *open klik*. Hanya kadang-kadang telat itu saja yang lebih sering, ya balik lagi ke telat.”, peneliti pun menanyakan tujuan yang terpenuhi dari penggunaan *website* DPRD ini, informan menjawab dengan sedikit mengeluh,

> “Tetap saja kita harus berhubungan langsung secara manual dengan anggota dewan. Jadi, tujuannya kurang terpenuhi. Tidak semua anggota dewan juga dapat memanfaatkan *website*nya hanya beberapa orang yang menggunakannya untuk sosialisasi.”[90]

Peneliti pun melanjut pertanyaan, “terus Pak, bagaimana perbedaan penggunaan *website* DPRD Jawa Barat http://dprd.jabarprov.go.id dengan media tradisional dalam pencarian berita dan informasi?”, informan HR menjawab,

> “Media luar lebih cepat *update* dibandingkan *website* DPRD. Perbedaan *website* DPRD itu tidak bisa menyeluruh sedangkan media *online* yang lain bisa. Dengan media cetak sama suka telat, tetapi beritanya masih ada yang baru, karena bisa menghubungi langsung narasumber.”[91]

ES informan penelitian selanjutnya mengatakan penggunaan *website* DPRD Jawa Barat itu bisa dikatakan baik jika selalu ter*update* informasinya,

---

[89] Ibid

[90] Wawancara pada 26 Mei 2011

[91] Ibid

seperti yang diungkapkannya, "Ya itu tadi kembali ke *updating*nya baik berarti pelaksanaannya sudah dapat dikatakan pelaksanaannya baik dan dapat menunjang kita.", disinggung mengenai tujuan yang terpenuhi dari penggunaan *website* DPRD Jawa Barat informan pun mengatakan, "Ya tujuannya sih hanya melihat saja, sebenarnya itu bukan acuan utama kita sih. Ya paling dari agenda kegiatan atau raperda saja kemudian dibuat isu."[92]

Mengenai perbedaan *website* DPRD Jawa Barat http://dprd.jabarprov.go.id dengan media konvensional dalam pencarian berita, informan hanya berpendapat bahwa,

> "Ya itu sih kalau *website* kita hanya melihat agenda dan raperda atau perda, jadi kalau ada yang lagi ramai raperda atau perdanya bisa cepat langsung diakses dan praktis bisa dilihat dari kantor (tempat kerja). Kalau media biasa sih ya kan harus mencari keluar."[93]

Berkaitan dengan hambatan atau kendala yang dirasakan dari penggunaan *website* DPRD Jawa Barat http://dprd.jabarprov.go.id di kalangan wartawan, ketiga informan wartawan itu hingga saat ini tidak menemukan hambatan yang besar, karena dalam mengakses *website* DPRD Jawa Barat http://dprd.jabarprov.go.id tergantung pada kekuatan masing-masing *server* tempat mereka mengakses. Hanya saja yang masih menjadi hambatan mereka ada dari pelayanan Bagian Humas dan Protokol dalam meng*update* berita dan informasi lainnya yang lambat atau sering telat untuk meperbaharui informasi yang dibutuhkan wartawan.

---

[92] Wawancara pada 31 Mei 2011

[93] Ibid

4.3 Pembahasan Penelitian

Hasil penelitian diatas merupakan suatu proses penelitian di lapangan yang telah dilakukan peneliti selama kurun waktu Mei 2011. Telah dibahas pada bab sebelumnya, bahwa metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode kualitatif dengan pendekatan kasus *Public Relations on the net* pada Bagian Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat melalui *website* DPRD Jawa Barat http://dprd.jabarprov.go.id dalam penyampaian informasi di kalangan wartawan.

4.3.1 Manfaat penggunaan *website* DPRD Jawa Barat http://dprd.jabarprov.go.id dalam penyampaian informasi di kalangan wartawan

Hadirnya *Website* DPRD Jawa Barat http://dprd.jabarprov.go.id bagi Bagian Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat merupakan kegiatan baru melalui internet dengan istilah *public relations on the net* menggunakan sistem *E-Government.* Menurut Booz Allen dan Hamilton, yang termasuk dalam kriteria manfaat adalah :

> "Cakupan layanan yang sudah diimplementasikan; Bagaimana layanan tersebut dapat diakses dalam *one stop shop* dari satu portal menuju berbagai layanan; dan kemudahan penggunaan dalam mendapatkan layanan tersebut".(Indrajit, 2006:43)

Melihat kriteria tersebut, *website* DPRD Jawa Barat sudah memiliki cakupan layanan yang telah berjalan pada *website* tersebut. Dengan cakupan layanan *website* DPRD Jawa Barat yang diimplementasikan melalui dua portal berbeda untuk kalangan internal dan publik, memberikan kemudahan

dalam mengakses layanan tersebut. Portal internal yang terdiri dari banyak menu untuk pengelolaan merupakan bentuk proses kegiatan *publik relations* secara *online* dalam menghimpun, mengolah, dan mempublikasikan data. Adanya penggunaan *website* DPRD Jawa Barat pada Bagian Humas dan Protokol dijadikan sarana untuk menyampaikan informasi yang cepat di kalangan wartawan, karena dapat mengganti kelemahan media publikasi konvensional(lembaran *press release*, papan pengumuman, dan majalah dinding) yang dahulu digunakan.

Informasi yang disampaikan, yakni mengenai kegiatan resmi yang difasilitasi Humas dan Protokol. Informasi yang disampaikan lebih detail pada satu tempat, yakni melalui penggunaan portal publik wartawan mendapatkan berbagai layanan menu aplikasi informasi sesuai dengan kebutuhan wartawan mengenai apa yang akan dan telah dikerjakan dewan secara resmi.

Pada portal internal Bagian Humas dan Protokol bisa menghimpun dan mengelola jadwal agenda kegiatan resmi dewan yang kemudian di*publish* secara langsung dalam satu waktu di menu aplikasi Agenda Dewan pada portal publik *website* DPRD Jawa Barat. Selanjutnya pembuatan *pressrelease* pun dapat langsung dijadikan sebuah berita pada portal publik *website*, sehingga wartawan dapat mengetahui informasi yang matang berupa berita tentang apa yang dikerjakan dewan secara resmi. Namun, dari hal tersebut menu yang lebih difokuskan Bagian Humas dan Protokol hanya sebatas membuat berita dan agenda kegiatan dewan saja. Sangat disayangkan dengan

layanan yang lengkap dari kedua portal yang menyediakan berbagai menu, hanya dimanfaatkan sebatas memberikan informasi jadwal agenda kegiatan, berita dewan, dan raperda atau perda saja. Pemanfaatan aplikasi lainnya belum optimal dijalankan oleh Bagian Humas itu sendiri.

Berkaitan dengan itu, maka manfaat penggunaan *website* DPRD Jawa Barat http://dprd.jabarprov.go.id dalam penyampaian informasi di kalangan wartawan hanya sebatas pemberitahuan mengenai kegiatan yang akan dan telah dilakukan dewan secara resmi kelembagaan. Tercermin pada portal publik yang terbagi atas tiga bagian menu, yakni Profil Dewan, Seputar Dewan, dan Halaman Utama, hanya pada Halaman Utama saja yang sering diakses untuk perolehan informasi bagi wartawan.

Sebenarnya tidak dapat dipungkiri bagi kalangan wartawan adanya penggunaan *website* DPRD Jawa Barat dalam penyampaian informasi sedikit membantu dalam menunjang pembuatan berita atau isu. Hal ini terlihat dari wartawan yang mengakses *website* DPRD Jawa Barat hanya sekadar untuk melihat jadwal agenda kegiatan resmi dewan. Melalui jadwal agenda kegiatan resmi dewan, para wartawan biasanya mengikuti kegiatan tersebut untuk mecari tahu hal apa saja yang akhirnya dapat ditarik menjadi isu menarik dalam pemberitaannya. Selain agenda kegiatan resmi dewan, wartawan pun melihat hasil kebijakan dewan dalam produk Perda maupun Raperda yang selanjutnya dijadikan data pendukung untuk meminta konfrimasi kepada instansi yang terkait Perda maupun Raperda tersebut. Manfaat dari penggunaan *website* DPRD Jawa Barat dalam penyampaian informasi di

kalangan wartawan untuk mempercepat penyampaian informasi dewan, akan tetapi kalangan wartawan sendiri merasa kurang optimal dalam memperoleh informasi yang baru dari Bagian Humas dan Protokol, karena informasi yang disajikan tidak dapat ter*update* dengan cepat. Padahal dengan adanya penggunaan *website* ini dimanfaatkan wartawan untuk kecepatan memperoleh informasi, terlebih bagi kalangan wartawan yang dituntut *deadline* pada masing-masing medianya. Tak hanya itu, *pressrelease* yang dijadikan berita dalam *website* DPRD tidak memiliki manfaat yang berarti bagi kalangan wartawan. Kalangan wartawan merasa berita tersebut hanya sebatas ekspose kegiatan resmi dewan. Oleh karena itu, pemberitaannya belum dapat dikatakan memiliki nilai berita yang sesuai dengan kepentingan misi wartawan dan pemilik media tersebut, sehingga manfaat penggunaan *website* DPRD Jawa Barat dalam penyampaian informasi di kalangan wartawan hanya sebagai sumber pencarian data tambahan dan data pendukung untuk menarik isu dalam pembuatan beritanya yang berkaitan dengan DPRD Jawa Barat. Selain itu, manfaat penggunaan *website* DPRD Jawa Barat sebagai sarana publikasi Bagian Humas melalui internet dalam menyampaikan informasi yang detail serta langsung diakses wartawan secara cepat.

4.3.2 Efisiensi penggunaan *website* DPRD Jawa Barat http://dprd.jabarprov.go.id dalam penyampaian informasi di kalangan wartawan

Efisiensi merupakan ketepatan cara yang dirasakan mudah mencapai tujuan tanpa adanya hambatan dari segi waktu dan biaya. Menurut Effendy

efisiensi berasal dari kata efisien yang memiliki arti ketepatan dalam mencapai tujuan dengan biaya yang telah ditetapkan. (Effendy, 1993:8)

Kegiatan yang dilakukan Bagian Humas dan Protokol dalam menyampaikan informasi melalui penggunaan *website* DPRD Jawa Barat http://dprd.jabarprov.go.id merupakan kegiatan yang menggunakan kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi melalui internet. Ketersediaan teknologi internet ini dapat memberikan efisiensi dalam penyampaian informasi di kalangan wartawan. Dengan kriteria efisiensi yang dikemukakan Booz Allen dan Hamilton yakni,

> "Ketersediaan arsitektur proses, aplikasi, dan *database* yang bisa berjalan baik ketika dibutuhkan; Perencanaan sumber daya dan keuangan secara baik; Pemanfaatan *platform* teknologi informasi dan teknologi secara maksimal pada keseluruhan aspek; Kualitas dan ruang lingkup pelatihan bagi para staf dan pegawai."(Indrajit, 2006:43)

Adanya dua portal yang dapat diakses secara bersamaan oleh Bagian Humas dan Protokol dapat mengurangi proses kerja dari sisi waktu. Aplikasi yang selalu berjalan dengan baik, seperti CMS (*Content Management System),* memudahkan staf Humas dan Protokol untuk menambahkan dan mengubah isi dari situs *website* DPRD Jawa Barat. Penggunaan *website* DPRD Jawa Barat http://dprd.jabarprov.go.id memberikan peningkatan kualitas pelayanan terhadap wartawan. Sebelumnya, pelayanan yang diberikan melalui siaran berita dalam bentuk lembaran kertas atau jadwal kegiatan yang ditulis di papan pengumuman membutuhkan waktu yang cukup lama bagi pencari berita, sehingga informasi yang disampaikan tidak efisien, karena keterbatasan ruang, waktu, serta tidak dapat menjangkau kalangan

wartawan luar. Dari segi informasi yang disampaikan terkesan lambat dan basi, sehingga tidak efektif lagi untuk bahan pemberitaan. Informasi yang tidak bisa ter*update* sewaktu-waktu pula menghambat produktivitas wartawan dalam pencarian berita. Dengan adanya *website* DPRD Jawa Barat http://dprd.jabarprov.go.id dapat memudahkan Bagian Humas dan Protokol menyampaikan informasi di kalangan wartawan. Seiring dengan kemajuan teknologi Bagian Humas dan Protokol melalui penggunaan *website* sesuai dengan biaya yang telah dianggarkan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat dalam memberikan informasi di kalangan wartawan dituntut untuk lebih detail dan menyeluruh mengenai kegiatan dewan yang difasilitasi Humas. Sehingga dengan fasilitas yang lengkap pada *website* dalam penyampaian informasi cukup hemat dibandingkan dengan sarana publikasi terdahulu yang konvensional.

Selain itu, kalangan wartawan dapat mengakses *website* DPRD Jawa Barat secara cepat, mudah, dan murah hanya dengan memanfaatkan fasilitas yang mereka miliki, seperti *Handphone*, *Wi-Fi*, atau komputer yang telah terhubung koneksi internet dimana saja dan kapan saja. Melalui *website* DPRD Jawa Barat, kalangan wartawan tidak perlu selalu mendatangi Bagian Humas dan Protokol hanya untuk mencari informasi kegiatan resmi yang dilakukan dewan.

Dengan pemanfaatan teknologi internet, penggunaan *website* DPRD Jawa Barat memberikan ketepatan cara, kepraktisan, dan penghematan dari segi waktu serta biaya untuk menjangkau sasaran yang lebih luas dengan

informasi yang menyeluruh. Namun, bukan kemudahan dan kecepatan yang diperlukan, sebenarnya efisiensi penggunaan *website* perlu didukung oleh kemampuan dan pengetahuan para staf Bagian Humas dan Protokol yang hingga saat ini masih kurang, karena penggunaan *website* DPRD Jawa Barat merupakan suatu sarana yang baru terutama bagi kegiatan Humas secara *online.* Dengan kemampuan staf di bidang teknis, (seperti penggunaan aplikasi pada *website* DPRD Jawa Barat dan pengontrolan informasi dalam *website)* maupun bidang keterampilan dalam penyusunan *release* yang memuat 5W+1H dalam *website* DPRD Jawa Barat dapat meningkatkan kualitas layanan sebagai pendukung efisiensi penggunaan *website* DPRD Jawa Barat http://dprd.jabarprov.go.id dalam penyampaian informasi di kalangan wartawan.

4.3.3 Partisipasi pada penggunaan *website* DPRD Jawa Barat http://dprd.jabarprov.go.id dalam penyampaian informasi di kalangan wartawan.

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi peneliti, partisipasi pada penggunaan *website* DPRD Jawa Barat http://dprd.jabarprov.go.id lebih ditujukan bagi masyarakat. Kalangan wartawan tidak pernah berpartisipasi pada penggunaan *website* DPRD Jawa Barat http://dprd.jabarprov.go.id dalam bentuk apapun, baik memberikan tanggapan melalui menu Kirim Aspirasi atau pengisian berita pada *website* DPRD Jawa Barat. Hal ini dipertegas oleh Nanang Syaefudin sebagai Kepala Sub Bagian Publikasi,

"Ada untuk masyarakat namanya aspirasi (Kirim Aspirasi), kalau untuk wartawannya tidak ada, justru mereka yang membutuhkan kita, apa yang ada di media itu, dari media (*website*) kita kemudian di*caplok* untuk dijadikan berita."[94] Seperti penjelasan dalam sistem *E-Government*, partisipasi menurut Booz Allen dan Hamilton meliputi kriteria:

> "Akses langsung masyarakat terhadap orang yang berkepentingan melalui *web*; Pertimbangan terhadap umpan balik dan keinginan masyarakat; Pengaruh dan keterlibatan masyarakat masyarakat dalam proses pengambilan keputusan; Kemungkinan untuk memperdebatkan topik yang menyangkut masyarakat umum (tersediinya fasilitas *chatting*, forum, milis)." (Indrajit, 2006:44)

Berdasarkan hal tersebut, partisipasi pada penggunaan *website* DPRD Jawa Barat http://dprd.jabarprov.go.id merupakan akses langsung masyarakat kepada dewan melalui menu "Kirim Aspirasi" pada portal publik. Partisipasi dalam bentuk aspirasi *online*, terdiri dari saran, keluhan, informasi hingga pertanyaan, digunakan sebagai pendukung kinerja dewan serta pertimbangan dalam pengambilan keputusan suatu kebijakan, yakni Perda maupun Raperda. Namun, dari aspirasi masyarakat yang masuk, tidak secara langsung ditanggapi dengan balasan dari pihak Humas selaku fasilitator dewan. Hanya saja, aspirasi yang masuk dibuatkan suatu bentuk laporan dan selanjutnya diberikan kepada dewan untuk ditindak lanjuti. Memang memerlukan birokrasi dan waktu yang panjang untuk menanggapi suatu partisipasi dalam bentuk aspirasi, baik saran, keluhan, dan pertanyaan, maka dari itu, ada masyarakat yang mengganggap bahwa anggota dewan bukan wakil rakyat,

[94] Wawancara pada 30 Mei 2011

karena lambannya proses tindak lanjut dari aspirasi masyarakat sehingga terkesan tidak memihak pada rakyat. Kemungkinan masyarakat untuk berkomunikasi langsung dengan anggota dewan memang sulit, akan tetapi melalui akun jejaring sosial, terutama akun *Facebook* yang dibuat oleh Bagian Humas dan Protokol dapat menjadi sarana forum partisipasi masyarakat.

Melihat adanya bentuk partisipasi yang disediakan dalam *website* DPRD Jawa Barat, diakui kalangan wartawan, partisipasi dalam bentuk aspirasi untuk Anggota Dewan maupun Sekretariat pada *website* memang tidak diketahui oleh mereka. Bagi kalangan wartawan bukan menjadi suatu tujuan mengakses menu tersebut, karena wartawan hanya bertujuan mencari informasi dari jadwal kegiatan dewan, berita yang disiarkan di *website*, dan produk Perda dan Raperda jka diperlukan. Partisipasi dalam bentuk lain seperti pengisian kolom berita pada *website* DPRD Jawa Barat, kalangan wartawan pun belum pernah melakukannya. Hal tersebut dikarenakan, tidak adanya kewenangan dari Bagian Humas dan Protokol bagi wartawan untuk mengisi kolom berita. Bagian Humas dan Protokol tidak memberikan kewenangan tersebut karena Bagian Humas dan Protokol telah memiliki tim sendiri untuk melakukan peliputan kegiatan dewan yang sudah difasilitasi Bagian Humas dan Protokol, sehingga tim yang melakukan peliputan kegiatan dewan dianggap Bagian Humas dan Protokol sebagai wartawan. Hanya saja satu-satunya bentuk partisipasi di kalangan wartawan, yakni memberikan masukan kepada Bagian Humas dan Protokol sebatas teknis

pengelolaan informasi dalam *website* DPRD Jawa Barat yang terkadang belum ter*update* dan ada permasalahan dalam pengaksesan informasi dalam penggunaan *website* DPRD Jawa Barat http://dprd.jabarprov.go.id.

4.3.4 Transparansi informasi pada penggunaan *website* DPRD Jawa Barat http://dprd.jabarprov.go.id dalam penyampaian informasi di kalangan wartawan

Transparansi atau keterbukaan merupakan hal yang penting dalam penyampaian suatu informasi. Dalam kegiatan *Public Relations on the net* informasi yang terbuka dan rinci diperlukan, karena berkaitan dengan reputasi lembaga secara *online.* Kegiatan *Public Relations on the net* dengan konsep *E-government* sudah jelas membutuhkan transparasi untuk mendorong keterbukaan informasi. Menurut Booz Allen dan Hamilton transparansi merupakan apakah pemerintah dalam hal ini mendorong keterbukaan informasi menuju proses transparansi dalam pemerintahan.(Indrajit, 2006 :44)

Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat merupakan instansi perangkat daerah yang merupakan unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang tertuang dalam PERDA No. 20 Tahun 2008, menjadi suatu keharusan untuk memfasilitasi tugas dan fungsi lembaga DPRD yang merupakan lembaga legislatif. Melalui penggunaan *website* DPRD Jawa Barat http://dprd.jabarprov.go.id Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat mencoba mendorong proses keterbukaan informasi. *Website* yang dikelola Bagian Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat ini menampilkan berbagai informasi mengenai DPRD. Informasi yang

ditampilkan, yakni Profil Dewan, Seputar Dewan, Halaman Utama yang menyajikan berita kegiatan resmi dewan dan agenda kegiatan dewan.

Penggunaan *website* DPRD Jawa Barat, informasi yang disampaikan dituntut untuk transparan sesuai dengan fakta yang ada. Dengan memberikan informasi yang berganti setiap hari mengenai apa yang akan dilakukan dewan dan bagaimana hasil pelaksanaannya, melalui menu agenda kegiatan dan menu berita Bagian Humas dan Protokol mencoba mengarahkan informasi yang transparan pada *website* DPRD Jawa Barat. Bagian Humas dan Protokol sebagai fasilitator dewan dalam menyiarkan informasi yang transparan pada *website* telah dibatasi kebijakan instansi dan dewan, serta Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dimana informasi yang dimiliki badan publik wajib terbuka dan masyarakat serta pengguna informasi wajib mengetahui. Namun, terdapat pula pengecualian pada informasi badan publik yang dapat dirahasiakan tidak di informasikan kepada masyarakat dan pengguna informasi. Mengacu pada hal tersebut, Bagian Humas dan Protokol Sekretariat menyiarkan informasi yang terbuka hanya dari kegiatan resmi dewan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya. Informasi tersebut disampaikan untuk kalangan wartawan berupa informasi kegiatan dewan sesuai dengan fakta dilapangan.

Menurut semua informan penelitian dalam penelitian ini mengartikan transparansi sebagai keterbukaan, informasi yang disampaikan sesuai dengan fakta dan apa adanya. Akan tetapi, arti keterbukaan yang sesungguhnya tidak dapat dirasakan oleh sebagian kalangan, terutama kalangan wartawan.

Kalangan wartawan merasa transparansi informasi pada *website* DPRD Jawa Barat yang diberikan belum dapat dikatakan terbuka. Wartawan menganggap keterbukaan informasi tidak hanya memberikan informasi seputar kegiatan yang dilakukan dewan saja, meskipun kegiatan yang dilakukan dewan di lapangan sesuai dengan informasi pada *website* DPRD Jawa Barat. Namun, kalangan wartawan lebih menginginkan transparansi informasi melalui berita dalam *website*, yang lebih menyoroti dewan menindaklanjuti permasalahan yang berada di masyarakat sesuai dengan pelaksanaan perda yang telah disahkan. Seperti, informasi dewan menanggapi aspirasi masyarakat hingga menanggapi kritikan masyarakat tentang kinerja Pemerintah Daerah maupun kinerja dewan sendiri. Informasi tersebut dituangkan dalam bentuk berita atau artikel dalam *website* DPRD Jawa Barat, sehingga pemberitaan tidak monoton yang hanya menyoroti kegiatan resmi dewan.

Selain itu, transparansi informasi dalam *website*, terutama pemberitaan juga menurut kalangan wartawan harus dapat menyoroti penyelesaian masalah dari suatu *political issue* dan isu-isu negatif tentang DPRD. Adanya *website* ini Bagian Humas dan Protokol dapat mengklarifikasi suatu isu yang berkaitan dengan Anggota lembaga DPRD Jawa Barat, tentunya dalam bentuk pemberitaan. Hal ini tercermin, ketika ada pemberitaan lelang mobil dinas untuk pimpinan DPRD dengan anggaran Sekretariat yang menjadi polemik di media massa dan masyarakat[95]. Bagian Humas langsung

[95] http://dprd.jabarprov.go.id/index.php?m=seputar&t=news&id=677/8 Juni 2011, Pkl.19.00 WIB

memberitakan pernyataan pihak pimpinan DPRD yang melakukan pembatalan penggunaan mobil dinas tersebut pada *website* DPRD Jawa Barat.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi interpretasi peneliti bahwa keterbukaan informasi dalam *website* DPRD Jawa Barat bagi kalangan wartawan sangat sulit dilakukan apabila menyangkut pribadi seseorang dalam suatu lembaga. Bagian Humas dan Protokol sebagai fasilitator kegiatan dewan, dalam hal keterbukaan informasi terlebih melalui *website* DPRD Jawa Barat hanya memiliki kapasitas untuk melakukan penyampaian informasi sebatas kegiatan dewan yang berhubungan dengan hasil kerja dewan dan pengawasan pelaksanaan pemerintahan daerah, yang sesuai dengan tiga fungsi dewan, *bugedting*, *controlling*, dan legislasi. Informasi diluar lingkup tugas dan fungsi dewan bukan menjadi wewenang Bagian Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Jawa Barat sebagai bahan pemberitaan dalam *website* DPRD Jawa Barat, karena berkaitan dengan reputasi pencitraan lembaga DPRD sendiri.

4.3.5 Manejemen perubahan penggunaan *website* DPRD Jawa Barat http://dprd.jabarprov.go.id dalam penyampaian informasi di kalangan wartawan

Manajemen perubahan merupakan proses perubahan yang dikaitkan dalam hal teknis. Adapun kriteria manajemen perubahan menurut Booz Allen dan Hamilton diantaranya, “Strategi pengembangan; Kualitas kontrol dan *review*; Keterlibatam dan motivasi dari pegawai.” (Indrajit, 2006:44)

Dari kriteria tersebut yang terpenting adalah perencanaan awal dan pengembangan dari penggunaan *website* DPRD Jawa Barat yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan Bagian Humas dan Protokol sebagai fasilitator dalam penyampaian informasi dewan. Penggunaan *website* DPRD Jawa Barat merupakan suatu perencanaan dewan yang menginginkan informasi mengenai dewan langsung sampai kepada masyarakat. Tak hanya itu, dengan adanya *website* Bagian Humas dan Protokol memberikan fasilitas kepada wartawan agar dapat dengan mudah mengakses informasi DPRD yang menjadi sumber berita menarik di masyarakat. Pada pengembangannya *website* DPRD Jawa Barat dikelola oleh pihak luar yang berkemampuan dibidang IT *(Information Tecnology)* untuk *maintanence* dari *software* dan jaringan. Namun, pihak dalam tetap memiliki kewenangan untuk menggunakan *website* DPRD Jawa Barat, yakni Bagian Humas dan Protokol yang dalam hal pengelolaan konten isi dari aplikasi yang ada. Praktik *Public Relations on the net* yang menggunakan sistem *E-Government* diperlukan adanya monitoring dan kontrol yang ketat. Proses tersebut dilaksanakan setiap hari pada waktu-waktu tertentu. Proses monitoring dan kontrol yang dilakukan meliputi: *update* agenda kegiatan dewan dan berita, pengolahan input aspirasi dari menu aspirasi yang dijadikan laporan bulanan, dan pengontrolan *software* dan jaringan setiap dua kali seminggu.

Pentingnya pengelolaan dari segi *update* agenda dewan dan berita sangat dibutuhkan bagi kalangan wartawan. Adanya penggunaan *website* DPRD Jawa Barat dapat menunjang pekerjaan mereka, jika informasi yang

disampaikan selalu baru setiap harinya. *Updating* informasi dalam *website* DPRD Jawa Barat yang selalu menjadi keluhan di kalangan wartawan, karena informasi baru di *website* tidak bisa langsung disajikan. Wartawan biasanya harus menunggu minimal sore hari atau esok hari untuk mendapat informasi tersebut. Selain itu, untuk agenda kegiatan dewan masih terbatas hanya untuk dua atau tiga hari ke depan.

Keterlibatan seluruh staf Humas yang menjadi faktor utama dari pengelolaan *update* Informasi. Dalam praktik *Public Relations on the net,* Bagian Humas dan Protokol dituntut untuk selalu meng*update* informasi. Dengan kecanggihan media internet jelas difungsikan sebagai media ketersediaan informasi yang cepat dan aktual mengikuti perkembangan suatu kegiatan. Adanya keterbatas staf Humas yang memiliki kemampuan dan pengetahuan yang memadai di bidang ini, baik di bidang pembuatan berita dan *upload* data berita, agenda kegiatan, serta foto kegiatan.

4.3.6 Penggunaan *website* DPRD Jawa Barat http://dprd.jabarprov.go.id dalam penyampaian informasi di kalangan wartawan

Pengggunaan *website* DPRD Jawa Barat http://dprd.jabarprov.go.id merupakan suatu bentuk kegiatan Humas yang baru dalam menyampaikan informasi melalui internet secara *online*. Berkaitan dengan hal tersebut, Bagian Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan proses publikasi terutama penyampaian informasi dewan menggunakan media *website* dengan memanfaatkan teknologi internet. Hadirnya *website* DPRD Jawa Barat menjadi alasan tersendiri bagi Bagian

Humas dan Protokol seiring dengan kemajuan teknologi yang menjadi tuntutan zaman bagi lembaga tersebut. Penggunaan *website* DPRD Jawa Barat ini, selain dituntut perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, tetapi didasarkan oleh kebutuhan Pimpinan dan Anggota DPRD Jawa Barat sebagai saran sosialisasi kegiatan dan fasilitas dewan yang cepat dan langsung diterima masyarakat. Hal ini, digunakan pula oleh Bagian Humas dan Protokol untuk melengkapi sarana publikasinya agar dapat mempercepat dan memudahkan penyampaian informasi di kalangan wartawan. Melalui rapat BURT (Badan Urusan Rumah Tangga) dihasilkan rekomendasi untuk pengadaan *website* tersebut. Penggunaan *website* DPRD Jawa Barat diatur dalam Surat Keputusan Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Barat tentang Pengolahan Data dan Informasi *Online* DPRD Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan surat keputusan tersebut Bagian Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat ditunjuk sebagai pengelola *website* DPRD Jawa Barat.

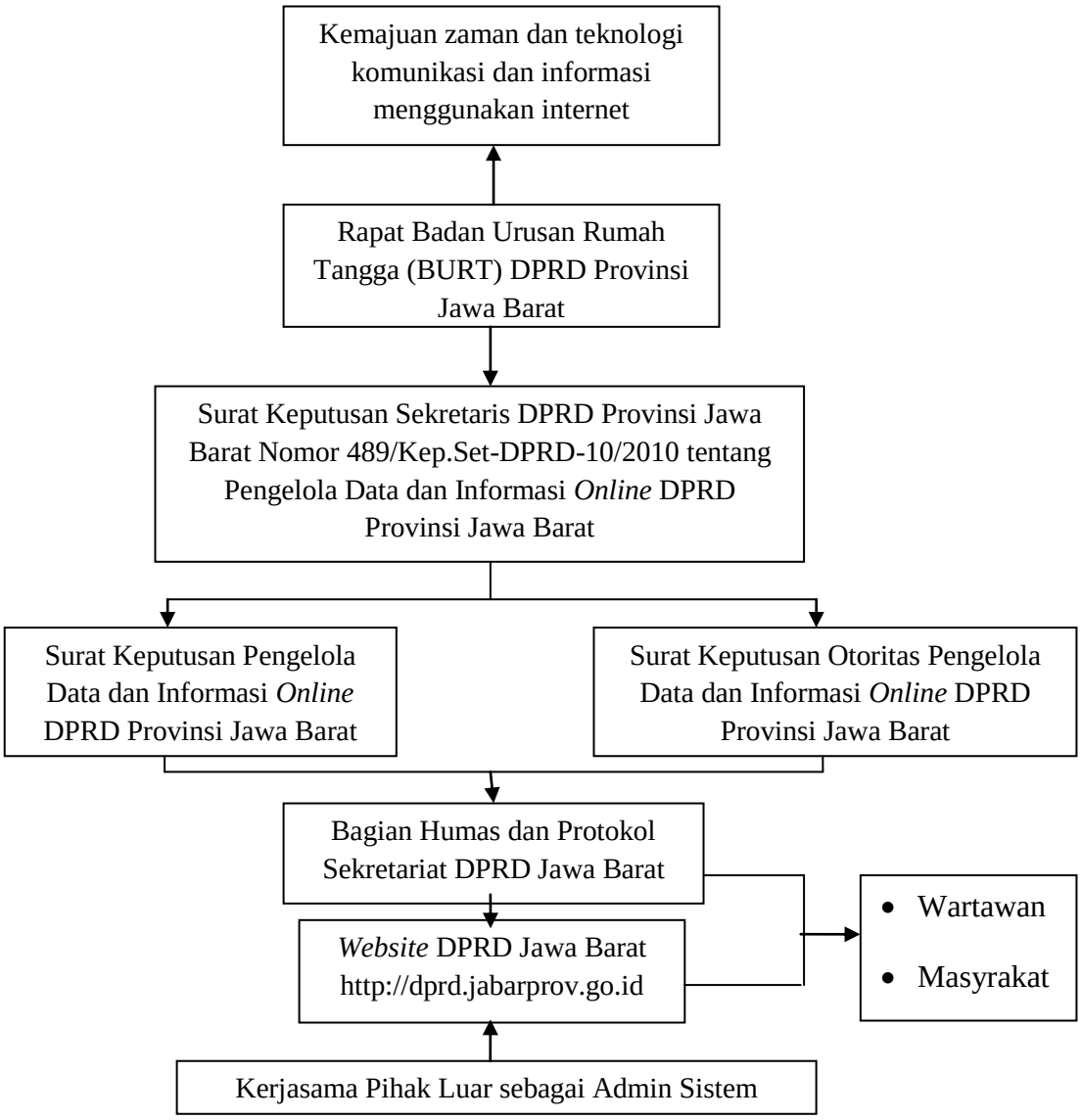
Website DPRD Jawa Barat menggunakan internet dapat memberikan kemudahan dibandingkan media konvensional dalam penyebaran informasi. Melalui kemajuan teknologi, Bagian Humas dan Protokol mampu membuat *press release* dalam bentuk berita matang yang langsung disiarkan pada *website* DPRD Jawa Barat. Selain itu, pengisian jadwal agenda kegiatan dewan dilakukan secara *online*. Hasil atau produk dewan seperti perda dan raperda dapat diakses melalui *website* yang terbuka bagi wartawan. Penggunaan *website* DPRD Jawa Barat memang ditujukan kepada

masyarakat luas, termasuk kalangan wartawan. Hal tersebut memang mendapatkan respon yang cukup positif bagi sebagaian kalangan wartawan, karena dengan adanya *website* mereka sedikit terbantu mengenai informasi dewan tanpa harus menunggu kiriman *press release* atau datang dan bertanya pada Bagian Humas dan Protokol. Penggunaan *website* DPDR Jawa Barat dalam penyampaian informasi di kalangan wartawan, hanya sebatas penunjang data pendukung dalam pencarian bahan berita yang berasal dari Agenda kegiatan dewan dan *press release* dalam bentuk berita matang. Penggunaan *website* DPRD Jawa Barat bagi kalangan wartawan merupakan sarana yang baik dalam menyampaikan informasi seputar kegiatan resmi dewan, karena mudah, cepat, dan lebih praktis dalam pengaksesan data.

Namun, untuk menjalin hubungan baik tetap saja Bagian Humas dan Protokol mengirimkan *press release* melalui fasilitas *e-mail* kepada media massa yang terlibat dalam kerjasama. Bagi wartawan yang tidak memiliki kerjasama, penggunaan *website* DPRD Jawa Barat http://dprd.jabarprov.go.id oleh Bagian Humas dan Protokol dijadikan sarana sosialisasi kegiatan dewan, karena dapat mengganti fungsi media konvensional, seperti papan pengumuman maupun lembaran *press release* yang dinilai kurang efektif dan efisien dalam menunjang pencarian bahan berita. Dengan kemudahan yang ditawarkan *website* dengan teknologi internet tak lantas penggunaan tersebut terhindar dari hambatan-hambatan. Ada beberapa hambatan yang tentunya menjadi salah satu penilaian negatif kalangan wartawan dari hadirnya *website* DPRD Jawa Barat. Seperti kurang *update*nya informasi baik jadwal maupun

press release yang berbentuk berita matang secara redaksional kurang memiliki nilai berita yang menarik, serta informasinya yang masih bersifat ekspose kegiatan dewan. Oleh karena itu, dapat dibuat model penggunaan *website* DPRD Jawa Barat http://dprd.jabarprov.go.id dalam penyampaian informasi di kalangan wartawan, sebagai berikut:

Gambar 4.8
Model Proses Awal Penggunaan *Website* DPRD Jawa Barat
http://dprd.jabarprov.go.id



Sumber : Analisis Peneliti, 2011

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara mendalam, observasi dan analisis dari penggunaan *website* DPRD Jawa Barat http://dprd.jabarprov.go.id dalam penyampaian informasi di kalangan wartawan dengan konsep *E-Government* melatarbelakangi hadirnya kegiatan *Public Relations on the net*. Dalam pelaksanaannya melalui *website* yang dikelola Bagian Humas dan Protokol dikaitkan dengan teori *Balance E-Government Scorecard,* ternyata dapat mendekati lima dimensi *Balance E-Government Scorecard.* Menurut Booz Allen dan Hamilton lima dimensi dalam *Balanced E-Government Scorecard,* yaitu manfaat, efisiensi, partisipasi, transparansi, dan manajemen perubahan. (Stiftung dalam Indrajit, 2005:43)

1. Dimensi pertama, **manfaat** berhubungan dengan kualitas dan kuantitas layanan yang diberikan dan bagaimana masyarakat mendapatkan manfaat dari layanan tersebut.

   Manfaat dari penggunaan *website* DPRD Jawa Barat http://dprd.jabarprov.go.id dalam penyampaian informasi di kalangan wartawan berhubungan dengan penyampaian informasi sebagai sumber data acuan yang menunjang kegiatan pencarian isu untuk pemberitaan seputar DPRD Jawa Barat. Kalangan wartawan dengan mudah mengakses *website* DPRD JABAR selama 24 *one stop shop,* dimana dari satu portal, yakni portal publik dapat menuju berbagai layanan. Seperti, Profil dewan, Seputar dewan, dan Halaman utama.

2. Dimensi kedua, **efisiensi** berhubungan dengan bagaimana teknologi bisa mempercepat proses dan meningkatkan kualitas layanan.

   Adanya kegiatan publikasi Bagian Humas dan Protokol menggunakan internet dapat memberikan ketepatan cara, kepraktisan, dan penghematan dari segi waktu serta biaya untuk menjangkau sasaran yang lebih luas dengan informasi yang menyeluruh menggunakan *website* DPRD Jawa Barat. Ketersedian aplikasi CMS (*Content Management System*) dapat mengefisiensikan kinerja Humas dalam membuat dan mempublish berita untuk wartawan. Dengan portal publik yang dapat diakses dimana dan kapan saja memberikan efisiensi waktu pencarian bahan berita bagi kalangan wartawan dengan fasilitas yang mereka miliki.

3. Dimensi ketiga, **partisipasi** berhubungan dengan pertanyaan apakah layanan yang diberikan memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk memberikan partisipasi dalam penyampaian pendapat dan proses pegambilan keputusan.

   Akses langsung 24 jam dengan aplikasi “Kirim aspirasi” sebagai sarana pengunjung meyampainkan keluhan, saran, informasi dan tanggapan kepada dewan atau sekretariat. Partisipasi yang dilakukan merupakan sebagai pendukung kinerja dewan serta pertimbangan dalam pengambilan keputusan suatu kebijakan, yakni Perda maupun Raperda.

4. Dimensi keempat, **transparansi**. Apakah pemerintah dalam hal ini mendorong keterbukaan informasi menuju proses transparansi dalam pemerintahan.

Transparansi informasi dalam *website* DPRD Jawa Barat, mangacu kepada amanat Undang-Undang No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dimana informasi yang dimiliki badan publik wajib terbuka dan masyarakat serta pengguna informasi wajib mengetahui. Bagian Humas dan Protokol sebagai fasilitator kegiatan dewan, hanya memiliki kapasitas untuk melakukan keterbukaan penyampaian informasi sebatas kegiatan dewan yang berhubungan dengan hasil kerja dewan dan pengawasan pelaksanaan pemerintahan daerah, yang sesuai dengan tiga fungsi dewan, *bugedting, controlling,* dan legislasi.

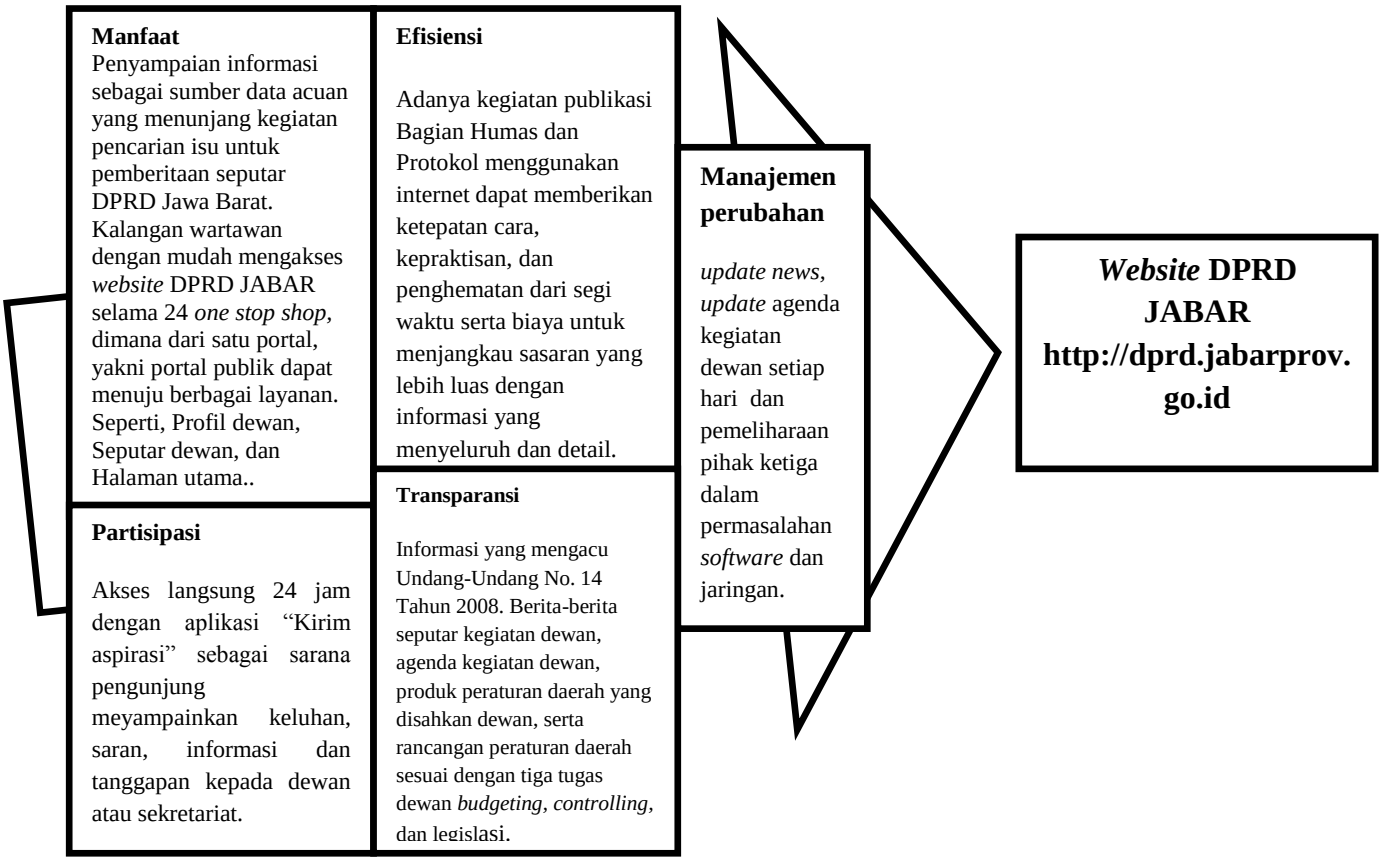
5. Dimensi kelima, **manajemen perubahan.** Terkait dengan proses implementasi apakah ada proses *review* yang jelas dan dikelola dengan baik.

   Proses monitoring dan kontrol yang dilakukan meliputi: *update* agenda kegiatan dewan dan berita, pengolahan input aspirasi dari menu aspirasi yang dijadikan laporan bulanan, dan pengontrolan *software* dan jaringan setiap dua kali seminggu.

Penjelasan mengenai konsep *E-Government* pada *website* DPRD Jawa Barat dapat digambarkan pada gambar 4.9 berikut ini :

Gambar 4.9

Konsep *Balanced E-Government Scorecard* dalam Penggunaan *Website* http://dprd.jabarprov.go.id



Sumber : Modifikasi peneliti terhadap konsep *Balanced E-Government Scorecard,* 2011.

Penggunaan website DPRD JABAR http://dprd.jabarprov.go.id yang dikelola Bagian Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat, merupakan kegiatan *Public Relation on the net.* Dengan menggunakan media *online* dalam setiap penghimpunan, pengelolaan, dan penyiaran data, Bagian Humas dan Protokol diberikan keuntungan informasi cepat sampai publik, *website* DPRD menjadi sarana penyebaran informasi yang menyeluruh,

website DPRD yang dapat diakses siapa pun sehingga menjadi sarana mendapatkan informasi kemajuan dunia, tidak terbatas oleh ruang dan waktu, dan dengan *website* yang menyediakan saran aspirasi dapat membuka saluran komunikasi secara *online.*